



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULUKUMBA**

**FSVA
2024**

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS





BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188-45-710 TAHUN 2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2024

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, serta untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;

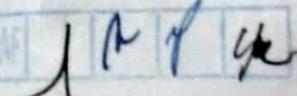
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

PARAF 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Bulukumba serta sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Oktober 2024

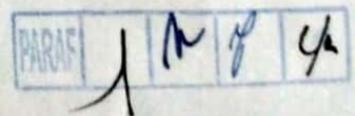
Pjs. BUPATI BULUKUMBA



MUHAMMAD RASYID

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.



KATA PENGANTAR



2024.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan petunjuk-NYA yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga atas kehendak-NYA kami Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba dengan segala keterbatasan yang ada telah dapat menyelesaikan Penyusunan *Buku Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA) Kabupaten Bulukumba Tahun*

Adapun buku ini menggambarkan tentang kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dari berbagai jenis kegiatan dengan didukung data yang diperoleh dari Instansi / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Namun kami menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan di dalamnya, tetapi hal itulah yang menjadikan kami tetap selalu untuk berupaya melakukan perbaikan, pembenahan dan validasi agar dimasa mendatang dapat melakukan penyempurnaan.

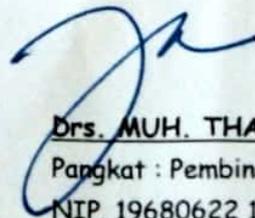
Guna mewujudkan peningkatan dan perubahan prioritas pada masing masing indikator perlu kiranya kerja sama yang berkesinambungan antar instansi pada daerah yang memerlukan penanganan lebih lanjut

Atas nama segenap penyusun, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Bulukumba yang telah memberikan arahan dan bimbingannya, juga kepada instansi / OPD terkait yang membantu kami memberikan validasi data pendukung dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Niat dan harapan kami, dengan Buku Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh semua pihak serta menjadi bahan acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Bulukumba untuk mencapai Visi : "*Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju Dan Sejahtera*"

Bulukumba, Oktober 2024

Kepala Dinas



Drs. MUH. THAIYEB MANINGKASI, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680622 198903 1 007

SAMBUTAN BUPATI



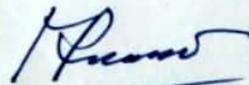
Kedaulatan pangan bermakna hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sementara itu, kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, diperlukan mekanisme untuk menilai prestasi, kekuatan, dan kelemahan atas upaya yang telah dilakukan serta untuk memperbaiki upaya yang akan dilakukan. Mekanisme tersebut dituangkan dalam wujud Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yang merupakan perubahan dan pemutakhiran dari peta sebelumnya. FSVA Kabupaten Bulukumba 2023 berisi gambaran penyebab dan akar permasalahan ketahanan dan kerentanan pangan di setiap kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Buku FSVA ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi dan rujukan untuk membuat kebijakan dan strategi intervensi yang tepat dalam upaya mengurangi jumlah penduduk rawan pangan.

Untuk itu, Saya menyampaikan penghargaan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba yang telah berupaya untuk dapat menyusun dan membuat Buku FSVA Kabupaten Bulukumba 2024. Peta baru ini menjadi bahan rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk dapat lebih fokus dalam memprioritaskan sumber daya guna mengatasi isu-isu penting kerawanan pangan secara komperhensif pada masa yang akan datang.

Saya berharap Dewan Ketahan Pangan Kabupaten Bulukumba dapat berperan aktif melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengambil langkah langkah lebih lanjut dan tindakan yang diperlukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan kemiskinan; meningkatkan kesejahteraan petani; serta mengatasi isu-isu ketahanan pangan untuk kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Bulukumba, Oktober 2024
Pjs. BUPATI BULUKUMBA



MUHAMMAD RASYID

NAMA TIM PENYUSUN FSVA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS – FSVA) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : **Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba**
- Ketua : **Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan**
- Sekretaris : **Mirnawati, SP., MP**
- Anggota :
1. **Ahmad Rizaldy Ihsan, SE., M. Si**
(Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba)
 2. **Indrayana, SKM., M. Kes**
(Nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba)
 3. **Nova Anrina, S.Tr.Sos**
(Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba)
 4. **Syamsuar, S. Si**
(Prakom Ahli Muda BPS Kabupaten Bulukumba)
 5. **Asra Eka Daeng Ngai, S. TP**
(Kasubag Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba)
 6. **Muthadayyinah, S.TP.,M.Si**
(Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba)
 7. **Mugfirah**
(Staf Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba)

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori Prioritas 3-6 . Prioritas 3 sebanyak **1 desa** dari 136 desa (**0,74%**) Prioritas 4 sebanyak **34 desa** (**25 %**), Prioritas 5 sebanyak **76 desa** (**56,62%**); dan **25 desa** (**18,38%**) yang tersebar di 10 kecamatan. Untuk Desa Prioritas 1, dan Prioritas 2 tidak ada di Kabupaten Bulukumba.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan
 1. Bobot Rasio sarana
 2. Bobot Rasio lahan
 3. Bobot rasio penduduk per tenaga Kesehatan per density
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN BUPATI	iii
NAMA TIM PENYUSUN FSVA TAHUN 2022	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	5
1.3 Metodologi	10
BAB II KETERSEDIAAN PANGAN	14
2.1 Lahan Pertanian	14
2.2 Produksi	19
2.3 Sarana dan Prasarana Ekonomi	25
2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	29
BAB III AKSES TERHADAP PANGAN	31
3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	31
3.2 Akses Transportasi	34
3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan	35
BAB IV PEMANFAATAN PANGAN	40
4.1 Akses Terhadap Air Bersih	41
4.2 Rasio Tenaga Kesehatan	42
4.3 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan	46
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	50
BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	55
5.1 Kondisi Ketahanan Pangan	56
5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	62
BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten Tahun 2023	11
Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu	14
Tabel 2.1 Sebaran Rasio Luas Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Prioritas	18
Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2018-2023	19
Tabel 2.3 Produksi Padi Tahun 2018-2023	21
Tabel 2.4 Produksi Jagung Tahun 2017-2023	22
Tabel 2.5 Produksi Ubi Kayu Tahun 2017-2023	23
Tabel 2.6 Produksi Ubi Jalar Tahun 2017-2023	24
Tabel 2.7 Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas	28
Tabel 3.1 Persentase Populasi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	32
Tabel 3.2 Sebaran Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	33
Tabel 4.1 Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	41
Tabel 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Desa Berdasarkan Skala Prioritas	45
Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk Tahun 2017-2021	47
Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	49
Tabel 5.1 Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas	58
Tabel 5.2 Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas per Kecamatan	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	7
Gambar 2.1 Grafik Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Total Lahan Berdasarkan Prioritas.....	18
Gambar 2.2 Grafik Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2018-2022	20
Gambar 2.3 Grafik Produksi Padi Tahun 2018-2023	21
Gambar 2.4 Grafik Produksi Jagung Tahun 2018-2023.....	22
Gambar 2.5 Grafik Produksi Ubi Kayu Tahun 2018-2023.....	24
Gambar 2.6 Grafik Produksi Ubi Jalar Tahun 2018-2023	25
Gambar 2.7 Grafik Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas.....	28
Gambar 3.1 Grafik Persentase Populasi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	32
Gambar 3.2 Grafik Sebaran Desa dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	33
Gambar 4.1 Grafik Sebaran Desa Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	41
Gambar 4.2 Grafik Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Desa Berdasarkan Skala Prioritas.....	45
Gambar 4.3 Grafik Penderita Gizi Buruk Tahun 2019-2023	48
Gambar 4.4 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan Per Kecamatan.....	49
Gambar 5.1 Grafik Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas ...	59

Gambar 5.2 Grafik Sebaran Jumlah Desa Prioritas 4 Per Kecamatan 61

Gambar 5.3 Grafik Sebaran Jumlah Desa Prioritas 5 Per Kecamatan 61

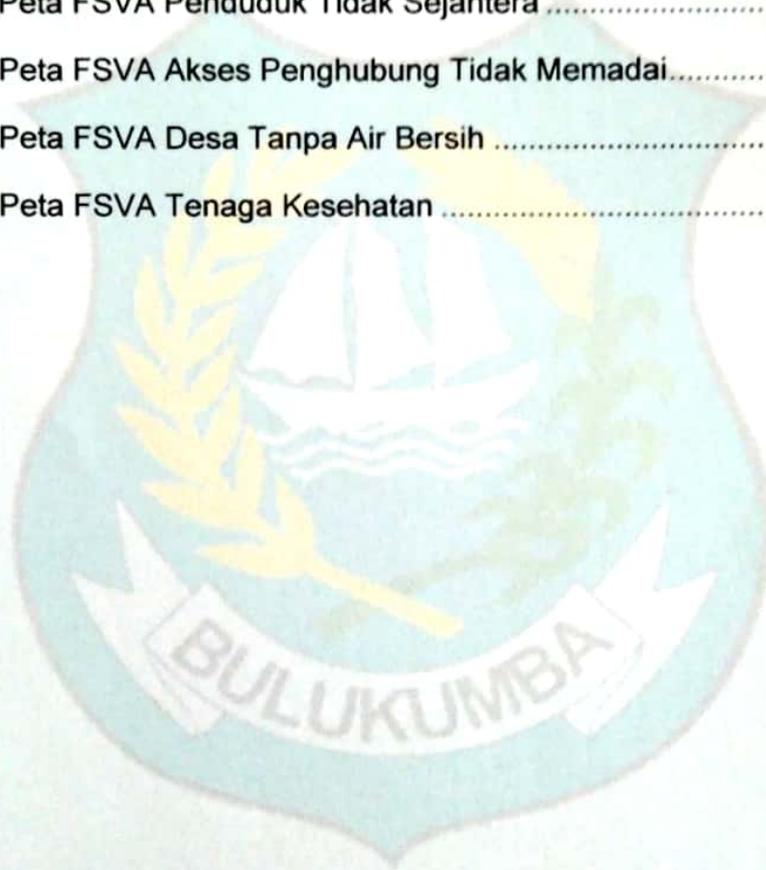
Gambar 5.4 Grafik Sebaran Jumlah Desa Prioritas 6 Per Kecamatan 62

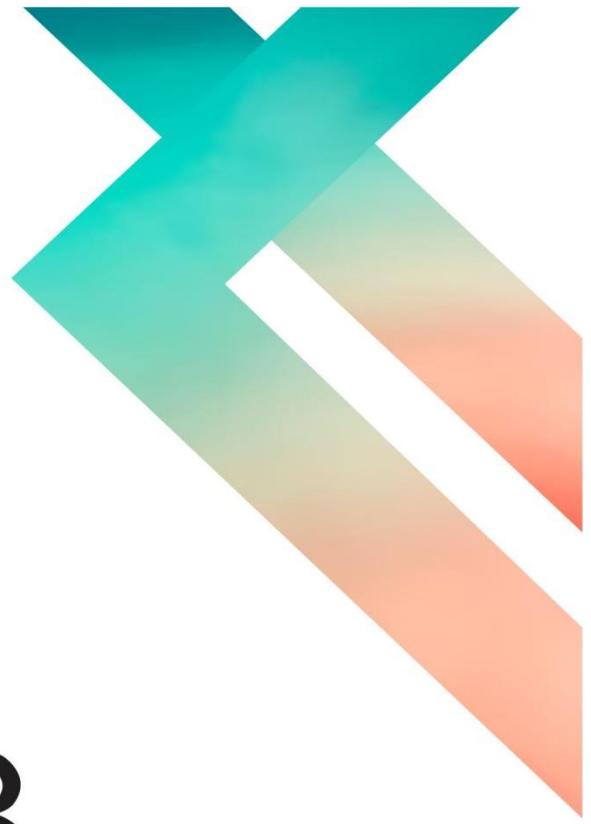
Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan . 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta FSVA Komposit
Lampiran 2 Peta FSVA Luas Baku Lahan Sawah
Lampiran 3 Peta FSVA Sarana dan Prasarana Ekonomi
Lampiran 4 Peta FSVA Penduduk Tidak Sejahtera
Lampiran 5 Peta FSVA Akses Penghubung Tidak Memadai
Lampiran 6 Peta FSVA Desa Tanpa Air Bersih
Lampiran 7 Peta FSVA Tenaga Kesehatan





BAB

I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yang terbagi dalam 109 desa dan 27 Kelurahan dengan total penduduk pada Tahun 2023 sebesar 471.688 jiwa (BPS) dengan jumlah penduduk perempuan 241.131 jiwa dan laki laki sebanyak 228.911 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 2 pulau yang semuanya berpenghuni yang terletak di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari . Secara geografis terletak di jazirah bagian Selatan propinsi Sulawesi Selatan, memanjang dari utara ke selatan di antara 5° 20'- 5°40' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 119° 50'- 120°28' Lintang Utara/Selatan. Kabupaten Bulukumba di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores / kepulauan Selayar; sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng yang memiliki wilayah daratan seluas 1.154,58 km² atau 115.458 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 617,86 km² atau 61.786 ha. Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai.

Perekonomian Kabupaten Bulukumba tergantung pada sektor lapangan usaha/industri yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 18,87 Triliun Rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,59%.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, sektor ini mengalami kenaikan sebesar 4,11% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan PDRB ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor lapangan usaha/industri mengalami kenaikan peranan. Seperti dari sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu dari 2,45% menjadi 2,46%; sektor Pengadaan Listrik dari 0,12% menjadi 0,13%; sektor Konstruksi dari 11,03% menjadi 11,53%, Sektor Transportasi dan Pergudangan dari 2,31% menjadi 2,47%, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 0,80% menjadi 0,81% dan Jasa Keuangan dan Asuransi dari 4,05% menjadi 4,08%. Sementara sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan peranan sebesar 6,54%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 16,59%, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 3,34%, Real Estate sebesar 3,91%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,34%, Jasa Pendidikan sebesar 2,79%, dan Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan. (sumber data Kabupaten Bulukumba dalam Angka, BPS Tahun 2024).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

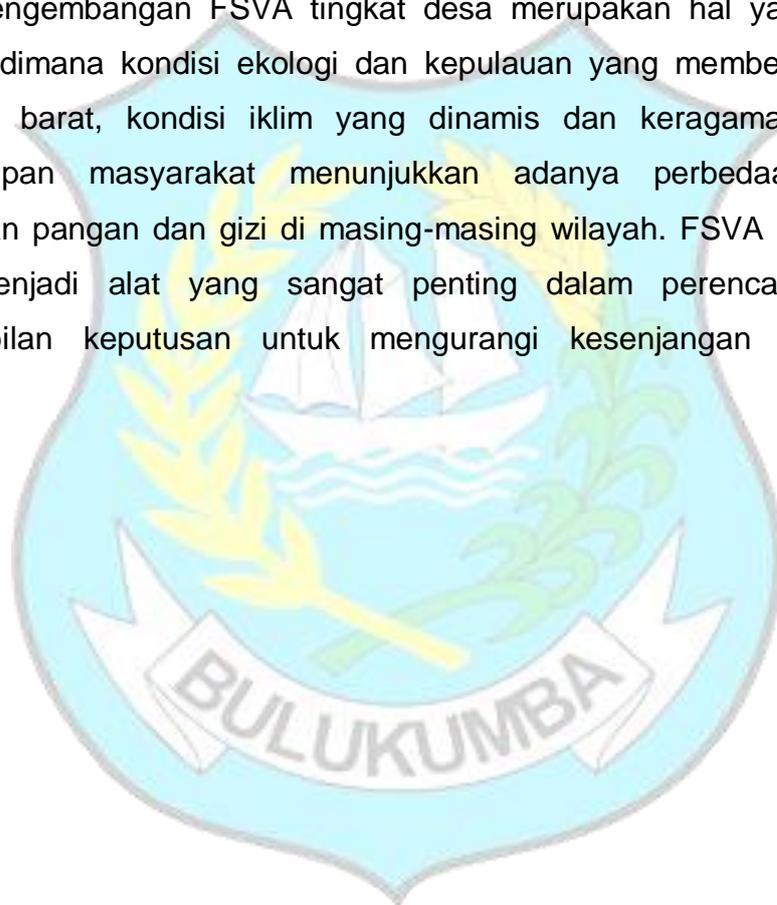
Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2024.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.



KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

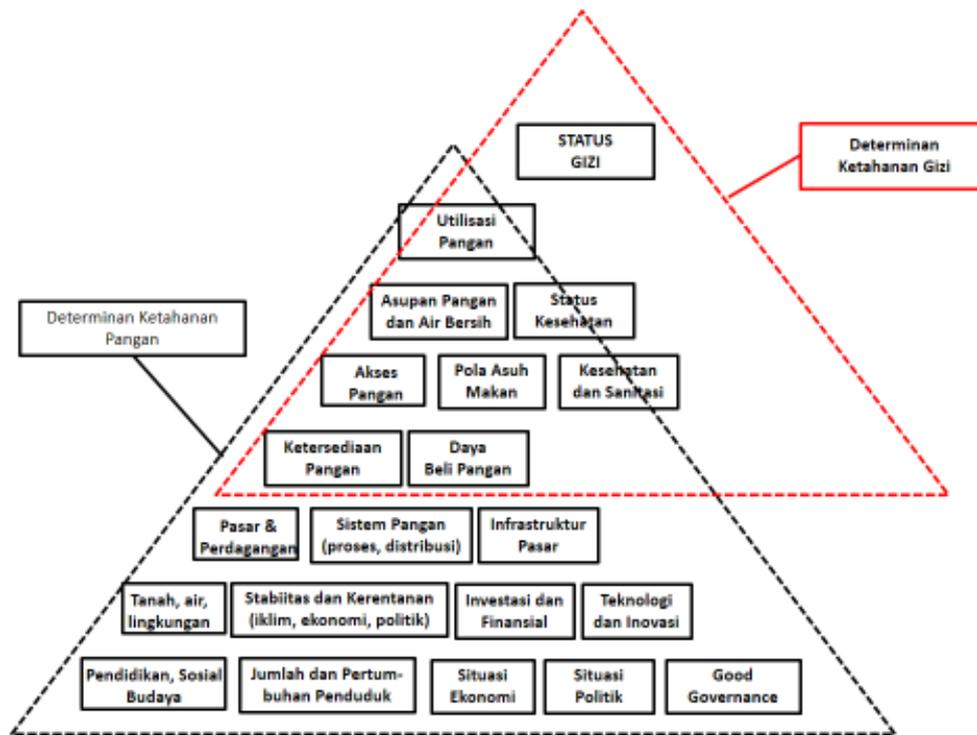
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996.

Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.2. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2023
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2023, Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2023
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018) Jumlah Rumah Tangga 2023 dari Proyeksi SP 2023, Dinas Sosial 2023
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2023, BPS

Indikator	Definisi	Sumber Data
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018), Dinas Kesehatan 2023.
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2023, Dinas Kesehatan, BPS Jumlah penduduk 2023 dari Proyeksi SP 2022

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots$$

(1)

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 \alpha_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

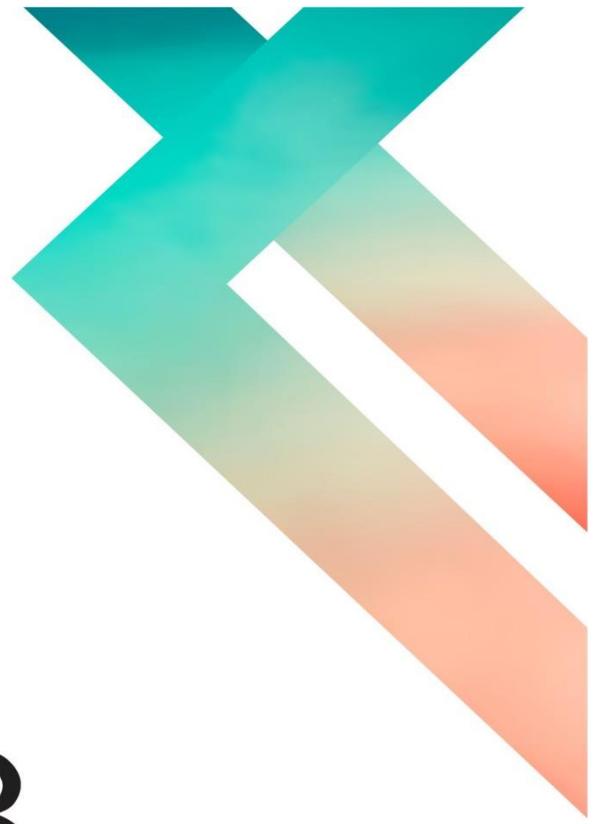
a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.



BAB

II

Ketersediaan Pangan



BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

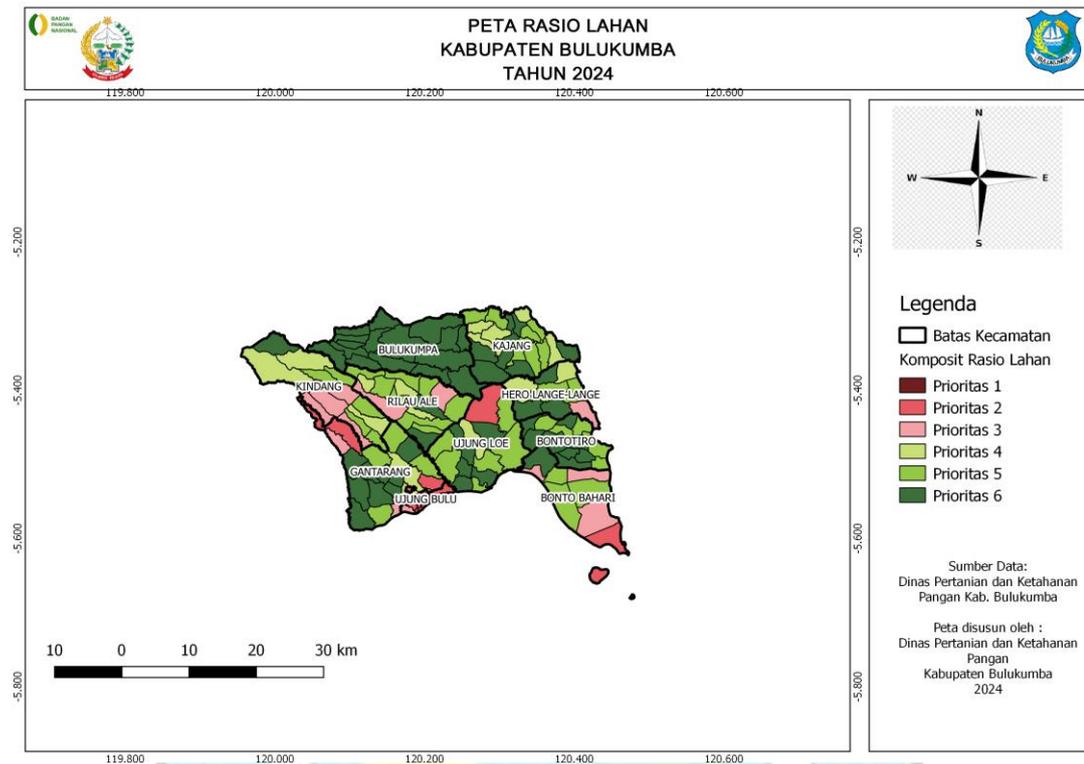
Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan

dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan¹. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.



Peta 2.1. Peta Rasio Lahan

Dari **136 desa** di Kabupaten Bulukumba, **1 desa** masuk dalam **prioritas 1 (0,74%)** yaitu Kelurahan Ela- Ela yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu. **12 desa prioritas 2 (8,82%)** yaitu Desa Benteng Gattarang, Desa Benteng Malewang, dan Desa Taccorong yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kelurahan Kasimpureng, Kelurahan Tanah Kongkong, Kelurahan Loka, Kelurahan Bentengge, Kelurahan Terang – Terang, Kelurahan Caile, Kelurahan Kalumeme yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu,

¹ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe, Desa Bira Kecamatan Bontobahari. **13 desa prioritas 3 (9,56%)** yaitu Kelurahan Matteko, Desa Gattareng yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kelurahan Bintarore yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Desa Darubiah, Desa Lembanna, Kelurahan Sapolohe yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Kelurahan Bontokamase yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Anrang dan Desa Karama yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa Balibo, Desa Garuntungan, Desa Anrihua dan Desa Sipaenre yang terletak di Kecamatan Kindang.. Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Ujung Bulu yaitu sebanyak 9 Kelurahan.

17 desa prioritas 4 (12,50%) yaitu Desa Paenrelompoe, Desa Polewali, Desa Bukit Tinggi yang terletak di Kecamatan Gantarang, Desa Balong yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Desa Tugondeng, dan Desa Gunturu yang terletak di Kecamatan Herlang, Kelurahan Tanah Jaya , Desa Bonto Baji, DesaPattiroang, Desa Tanah Towa, dan Desa Lolisang yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Bulolohe, Desa Bonto Bangun, dan Desa Bonto Mate'ne yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa Benteng Palioi, Kelurahan Borong Rappoa, dan Desa Kindang yang terletak di Kecamatan Kindang.

40 desa Prioritas 5 (29,41%) yaitu Kelurahan Jalanjang, Desa Palambarae, Desa Bukit Harapan, dan Desa Dampang yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kelurahan Dannuang, Desa Seppang, Desa Bijawang, Desa Garanta, Desa Manyampa, dan Desa Paccarammengang yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Kelurahan Tanah Lemo, Desa Ara, Kelurahan Tanah Beru yang terletak di Kecamatan Bontobahari,

Desa Tritiro, Kelurahan Ekatiro, Desa Dwitiro, Desa Batang, Desa Bontotangnga yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Kelurahan Tanuntung, dan Desa Singa yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Lembang, Desa Lembang Lohe, Desa Pantama, Desa Possi Tanah, Desa Lembanna, Desa Sapanang, Desa Batunilamung, yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Bontomanai, Desa Swatani, Desa Bontoharu, Kelurahan Palampang, Desa Bajiminasa, Desa Bontolohe, Desa Topanda, dan Desa Pangaloang yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa Mattirowalie, Desa Tamaona, Desa Orogading, Desa Sopa dan Desa Somba Palioi yang terletak di Kecamatan Kindang.

53 desa Prioritas 6 (38,97%) yaitu Kelurahan Mariorennu, Desa Bialo, Desa Bontomacinna, Desa Bontomasila, Desa Padang, Desa Barombong, Desa Bontosunggu, Desa Bontonyeleng, dan Desa Bontoraja yang terletak di Kecamatan Gantarang, Desa Salemba, Desa Manjalling, Desa Padangloang, Desa Lonrong, dan Desa Balleanging yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Kelurahan Benjala di Kecamatan Bontobahari, Desa Caramming, Desa Pakubalaho, Desa Buhung Bundang, Desa Bontobulaeng, Desa Tamalanrea, Desa Bontomarannu, Desa Bontobarua, Desa Lamanda yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Karassing, Desa Pataro dan Desa Borong yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Bontobiraeng, Desa Bontorannu, Kelurahan Laikang, Desa Tambangan, Desa Sangkala, Desa Malleleng, dan Desa Mattoanging yang terletak di Kecamatan Kajang. Desa Sapobonto, Desa Bonto Bulaeng, Desa Bulobulo, Desa Salassae, Desa Bonto Mangiring, Desa Jojjolo, Kelurahan Ballasaraja, Kelurahan Tanete, Desa Balangtaroang, Desa Kambuno, Desa Barugae, Desa Balang Pesoang, Kelurahan Jawi – Jawi, Desa Tibona, Desa Bonto Minasa, Desa Batulohe, dan Desa Baruga Riattang yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, Desa Tanah Harapan dan Desa Batukaropa yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa Kahayya yang terletak di Kecamatan Kindang.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH DESA	PERSENTASE
1	0	1	0.74
2	0,0159	12	8.82
3	0,0420	13	9.56
4	0,0674	17	12.50
5	0,1067	40	29.41
6	0	53	38.97

Gambar 2.1 Grafik sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas



2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 37,59 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Bulukumba yang menyumbang hampir 99,26% dari total produksi serealiala kabupaten.

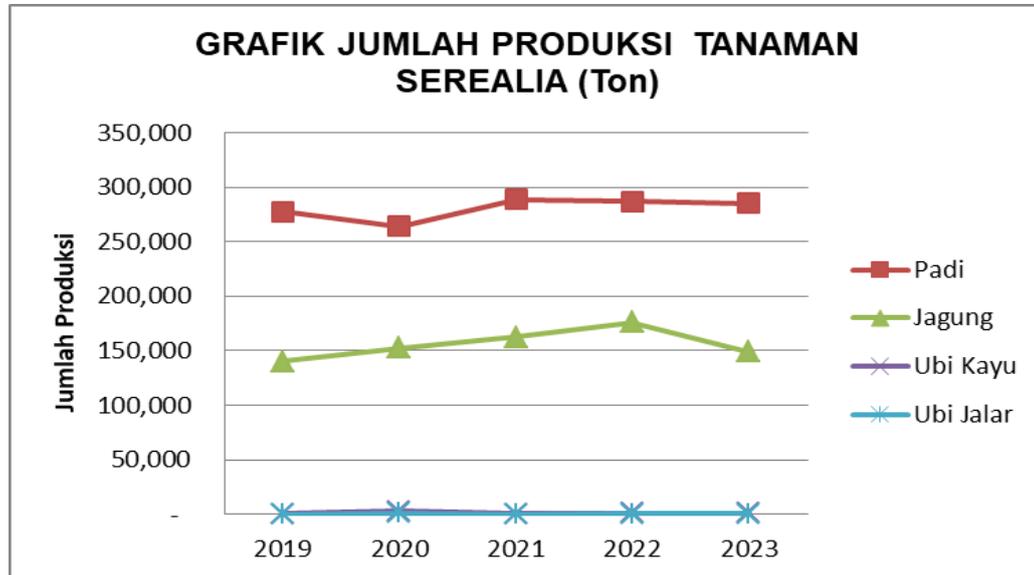
Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan produksi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan menurunnya produktivitas. Produksi padi meningkat 2,79% selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 277.226,84 ton tahun 2019 menjadi 285.206,27 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.2 Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Serealiala	2019	2020	2021	2022	2023	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
Padi	277,226.84	263,749.66	288,475.79	286,679.51	285,206.27	0,57
Jagung	140,006.78	152,702.96	162,571.88	175,914.26	148,916.27	1,27
Ubi Kayu	891.78	3,235.48	698.26	1,419.58	1,158.61	5,98
Ubi Jalar	200.44	1,095.70	272.90	443.12	437.90	23,69

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.2 Grafik produksi serealiala pokok dan umbi-umbian 2019-2023 (ton)



Tahun 2023, total produksi serealiala dan umbi-umbian mencapai 285.206,27 ton padi, 148.916,27 ton jagung, 1.158,61 ton ubi kayu, dan ubi jalar 437,90 ton. Total produksi serealiala dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,05 %, yaitu dari total produksi tahun 2019 sebesar 417.233,62 ton menjadi 434.122,54 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi serealiala selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 462.593,77 ton dan terkecil pada tahun 2020 sebesar 416.452,62 ton.

Padi

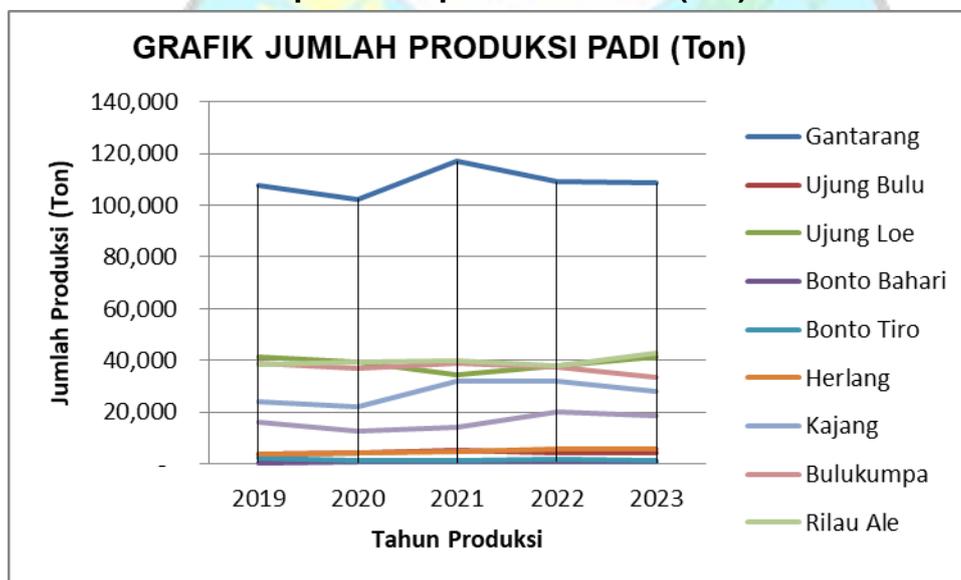
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Bulukumba selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2023 di 3 (Tiga) kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Rilau Ale, sedangkan di kecamatan lain mengalami penurunan. Produksi padi tertinggi yaitu di kecamatan Rilau Ale sebesar 42,642,91 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.3 Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton)

KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023	Laju Pertumbuhan (%)
Gantarang	107,678.95	102,331.28	117,040.54	109,104.19	108,604.22	0.86
Ujung Bulu	3,739.61	4,119.98	5,499.77	4,476.75	4,470.96	19.56
Ujung Loe	41,499.83	39,619.68	34,331.89	37,808.46	41,294.15	-0.49
Bonto Bahari	533.99	632.63	709.89	882.26	760.29	42.38
Bonto Tiro	2,268.16	1,206.58	1512.1	1,580.82	1,527.22	-32.67
Herlang	3,719.69	4,090.95	4,579.51	5,632.62	5,823.58	56.56
Kajang	24,098.6	22,256.88	32,110.37	32,130.49	27,939.15	15.93
Bulukumpa	39,087.05	37,125.63	38,820.8	37,285.87	33,584.79	-14.08
Rilau Ale	38,270.95	39,552.71	39,818.5	37,749.31	42,642.91	11.42
Kindang	16,330.01	12,813.34	14,052.43	20,028.74	18,523.02	13.43
TOTAL	277,226.84	263,749.66	288,475.80	286,679.51	285,206.27	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.3 Grafik produksi padi 2019-2023 (ton)



Jagung

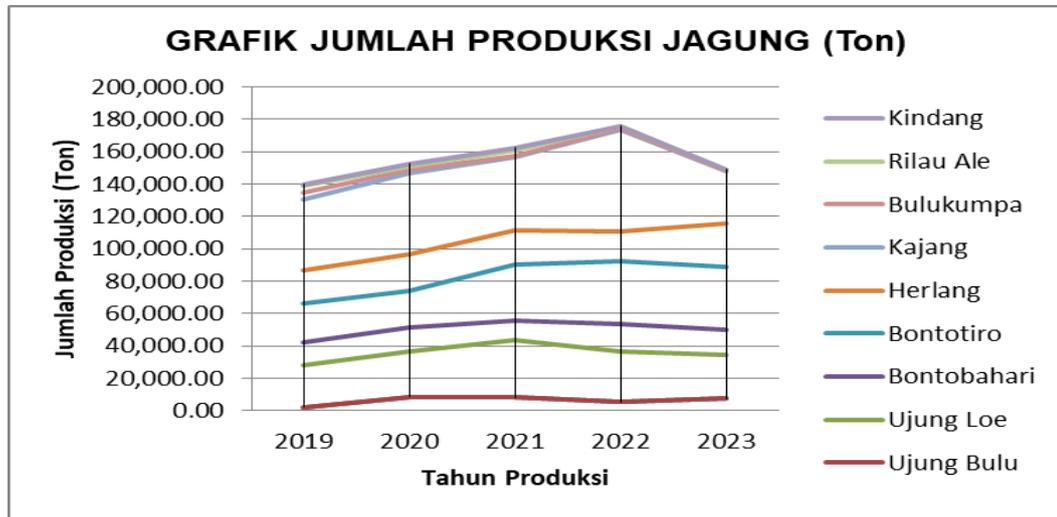
Pada tahun 2023, produksi jagung mencapai 148.916,27 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 17,05%. Penurunan produksi pada tahun 2023 disebabkan luas tanam berkurang. Sebaran produksi jagung terbesar selama kurung waktu 5 tahun terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 175.914,26 ton. Pada Tahun 2023, kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Bontotiro sebesar 39.093,76 ton, menyusul Kecamatan Kajang sebesar 32.305,55 ton, Kecamatan Ujung Loe sebesar 27.302,62 ton dan paling terendah adalah Kecamatan Ujung Bulu yaitu tidak terdapat produksi. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton)

KECAMATAN	JAGUNG				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gantarang	1,894.23	8,567.62	7,983.75	5,156.31	7.232.20
Ujung Bulu	8.96	-	-	2.00	-
Ujung Loe	26,165.34	27,695.30	35,477.93	31,564.91	27.302.62
Bontobahari	14,247.54	14,738.40	12,199.23	17,001.40	15,221.47
Bontotiro	23,892.34	22,638.18	34,555.53	38,510.20	39,093.76
Herlang	20,462.09	22,687.82	21,515.27	18,569.14	26,834.55
Kajang	44,069.84	50,241.29	44,593.97	62,529.77	32,305.55
Bulukumpa	3,998.45	2,520.67	1,246.77	869.60	55.99
Rilau Ale	4,516.90	1,625.12	3,295.14	1,284.91	821.89
Kindang	751.09	1,988.56	1,704.14	426.02	48.25
TOTAL	140,006.78	152,702.96	162,571.73	175,914.26	148,916.27

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.4 Grafik produksi jagung 2019-2023



Ubi Kayu

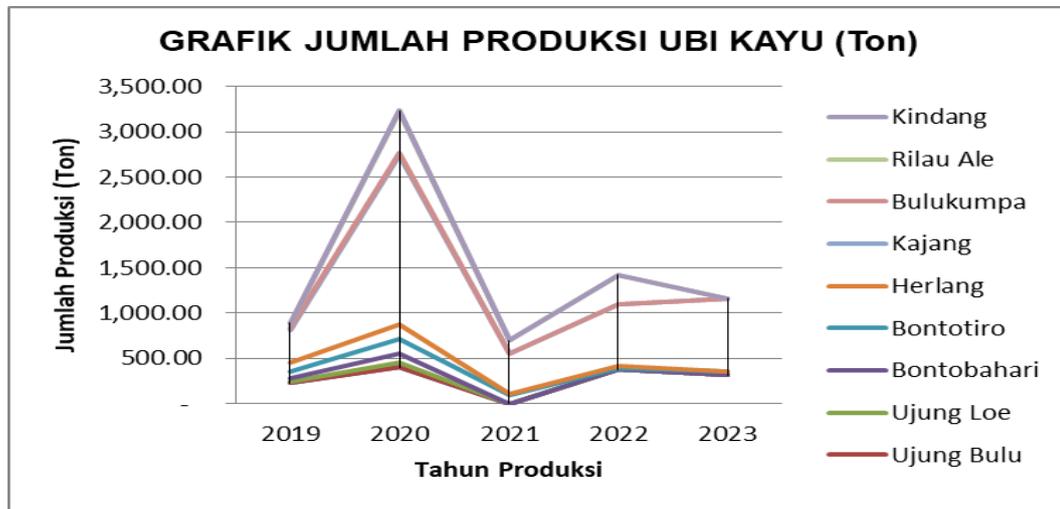
Produksi ubi kayu menurun dari 891,78 ton pada tahun 2019 menjadi 1.158,61 ton pada tahun 2023. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2023 adalah kecamatan Kajang sebesar 806,71 ton, Kecamatan Gantarang sebesar 316,50 ton, dan Kecamatan Bontotiro sebesar 35,40 ton sedangkan kecamatan lain tidak terdapat produksi ubi kayu. Rincian produksi ubi kayu tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Ubi Kayu 2019 - 2023 (Ton)

KECAMATAN	UBI KAYU				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gantarang	226.27	400.86	-	377.10	316.50
Ujung Bulu	-	-	-	-	-
Ujung Loe	12.58	50.00	-	-	-
Bontobahari	41.94	101.53	-	-	-
Bontotiro	75.68	158.28	98.92	19.00	35.40
Herlang	94.09	164.19	10.07	18.90	-
Kajang	358.67	1,865.38	442.86	682.47	806.71
Bulukumpa	21.39	26.04	-	-	-
Rilau Ale	50.18	455.78	146.42	322.11	-
Kindang	10.98	13.42	-	-	-
TOTAL	891.78	3,235.48	698.27	1,419.58	1,158.61

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.5 Grafik Produksi Ubi Kayu 2019-2023 (Ton)



Ubi Jalar

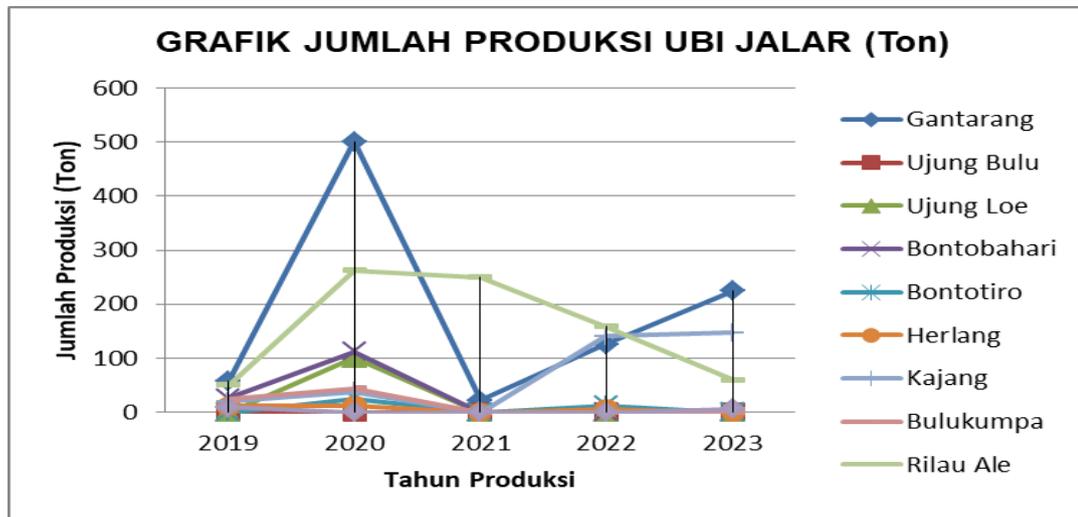
Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.095,70 ton. Tahun 2023, Kecamatan Gantarang merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 224,20 ton, Kecamatan Kajang sebesar 147,47 ton, Kecamatan Rilau Ale sebesar 60,12 ton dan Kecamatan Kindang sebesar 6,12 ton, sedangkan 6 (Enam) kecamatan lainnya tidak terdapat produksi ubi jalar. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton)

KECAMATAN	UBI JALAR				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gantarang	58.43	501.00	22.50	126.15	224.20
Ujung Bulu	-	-	-	-	-
Ujung Loe	-	100.18	-	-	-
Bontobahari	26.76	112.65	-	-	-
Bontotiro	-	25.02	-	12.00	-
Herlang	11.09	12.53	-	6.00	-
Kajang	19.83	37.56	-	140.37	147.47
Bulukumpa	24.45	43.84	-	-	-
Rilau Ale	50.65	262.92	250.40	158.60	60.12
Kindang	9.23	-	-	-	6.12
TOTAL	200.44	1,095.70	272.90	443.12	437.90

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar 2.6 Grafik produksi ubi jalar 2019-2023 (ton)



2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 136 desa di Kabupaten Bulukumba, **111 desa masuk dalam prioritas 1 (81,62%)** yaitu Kel.Mariorennu, Kel.Jalanjang, Kel.Matekko, Desa Paenre Iompoe, Desa Bialo, Desa Bontomacinna, Desa Bontomasila, Desa Padang, Desa Barombong, Desa Bontosunggu, Desa Polewali, Desa Palambarae, Desa Bukit Tinggi, Desa Bontonyeleng, Desa Dampang, Desa Bontoraja, Desa Benteng Gattareng, Desa Gattareng, Desa Benteng Mallewang, Desa Taccorong yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kel. Bintarore, Kel. Kasimpureng, Kel. Tanah Kongkong, Kel. Loka, Kel. Caille, Kel. Kalumeme, dan Kel. Ela – Ela yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Desa Salemba, Kel. Dannuang, Desa Manjalling, Desa Padangloang, Desa Seppang, Desa Bijawang, Desa Lonrong, Desa Balong, Desa Garanta, Desa Manyampa, Desa Balleanging, Desa Tamatto, Desa Paccarammengang yang terletak di Kec. Ujung Loe, Desa Bira, Desa Darubiah, Kel. Tanah Lemo, Desa Ara, Desa Lembanna, Kel. Tanah Beru, Kel. Sapolohe, Kel. Benjala yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Desa Caramming, Desa Tritiro, Desa Buhung Bundang, Desa Dwitiro, Desa Tamalanrea, Desa Bonto Marannu yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Karassing, Desa Borong, Kel. Bontokamase, Desa Singa, dan Desa Tugondeng yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Bontobiraeng, Desa Bontorannu, Desa Lembang, Desa Lembang Lohe, Kel. Tanah Jaya, Kel. Laikang, Desa Pantama, Desa Possi Tanah, Desa Lembanna, Desa Tambangan, Desa Sangkala, Desa Bontobaji, Desa Pattiroang, Desa Sapanang, Desa Batunilamung, Desa Tanah Towa, Desa Maleleng, Desa Mattoanging, Desa Lolisang yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Sapobonto, Desa Bontobulaeng, Kel. Ballasaraja, Desa Bontominasa, Desa Baruga Riattang yang terletak di Kecamatan Bulukumpa,

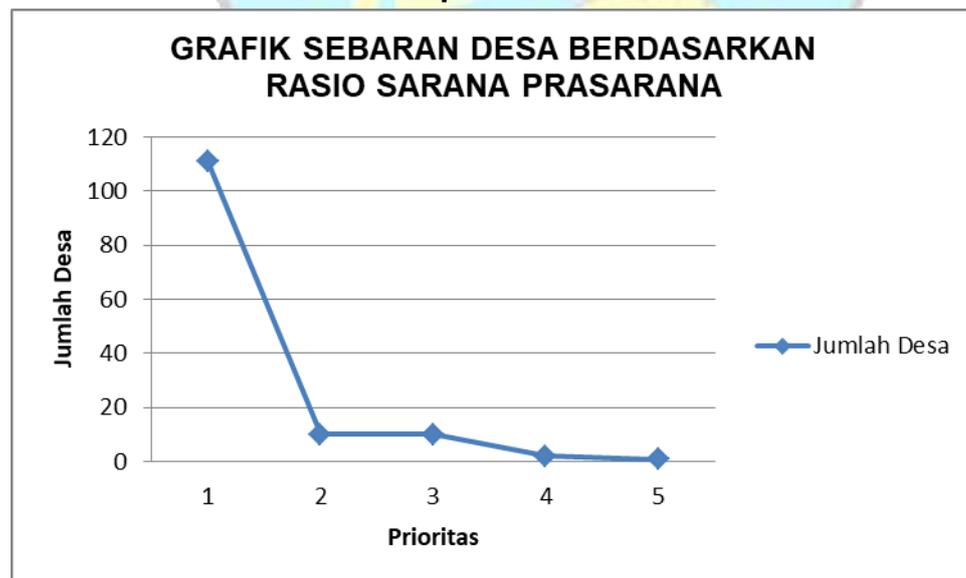
Desa Tanah Harapan, Desa Bontomanai, Desa Swatani, Desa Karama, Desa Batukaropa, Desa Bulolohe, Desa Bontobangun, Desa Bontoharu, Desa Bajiminasa, Desa Anrang, Desa Bonto Mate'ne, Desa Bontolohe, Desa Topandan dan Desa Pangaloang yang terletak di Kecamatan Rilau Ale. Desa Balibo, Desa Mattirowalie, Desa Benteng Palioi, Desa Garuntungan, Desa Anrihua, Kel. Borong Rappoa, Desa Tamaona, Desa Kindang, Desa Orogading, Desa Sopa, Desa Somba Palioi, Desa Sipaenre, dan Desa Kahayya yang terletak di Kecamatan Kindang.

10 desa prioritas 2 (7,35%) yaitu Kel. Bentengnge yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Desa Pakubalaho, Kel.Ekatiro, Desa Bontobarua yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Tanuntung dan Desa Gunturu yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Kambuno dan Desa Balang Pesoang yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, Desa Batulohe dan Kel. Palampang yang terletak di Kec. Rilau Ale, 10 desa prioritas 3 (7,35%) yaitu Kel. Terang – Terang yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Desa Bonto Bulaeng dan Desa Lamanda yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Pataro yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Bulo – Bulo, Desa Bontomangiring, Desa Jojjolo, Desa Balangtaroang, Desa Barugae, dan Desa Tibona yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, 2 desa prioritas 4 (1,47%) yaitu Desa Batang dan Desa Bontotangnga yang terletak di Kecamatan Bontotiro, 1 desa prioritas 5 (0,74%) yaitu Desa Salassae yang terletak Kecamatan Bulukumpa dan 2 desa prioritas 6 (1,47 %) yaitu Kel. Tanete dan Kel. Jawi – Jawi yang terletak di Kecamatan Bulukumpa.

Tabel 2.7 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	1	0,0346	111	81,62
2	2	0,0454	10	7,35
3	3	0,0582	10	7,35
4	4	0,0719	2	1,47
5	5	0,0899	1	0,74
6	6	0,0000	2	1,47

Gambar 2.7 Grafik sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas



2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

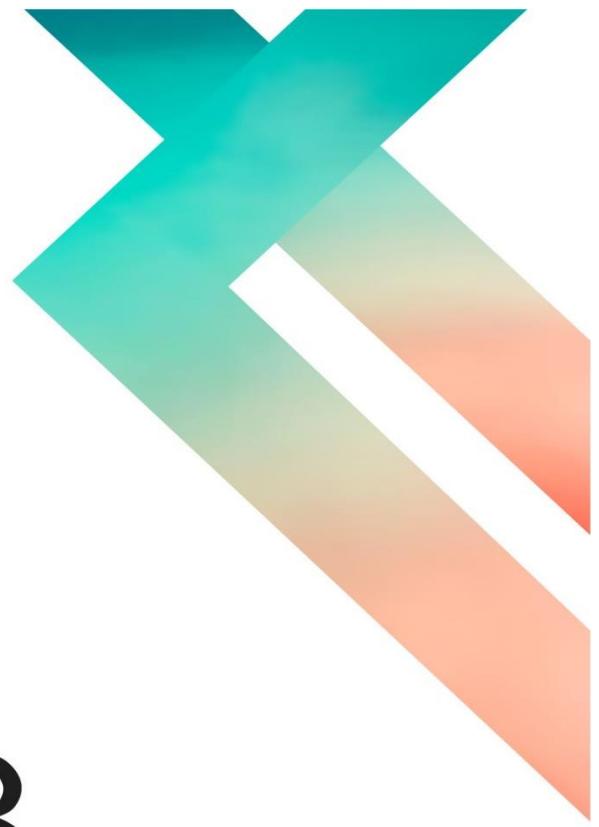
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 - 2023 mencapai 2,76 Persen per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 8,13% dan 2,48% Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 0,73 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 0,22 Ha. Sementara itu laju konversi lahan sebesar 0,13%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 96,32%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2021-2026 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
 - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
 - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - d. Pengelolaan air dan Itigasi sawah
 - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

- (ii) Perluasan lahan sawah
 - a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
 - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
 - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
 - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
 - d. Pemasaran produk pertanian, melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan pengembangan Toko Tani Indonesia Centre (TTI Centre) di setiap desa/Kelurahan



BAB

III

Akses Terhadap Pangan



BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

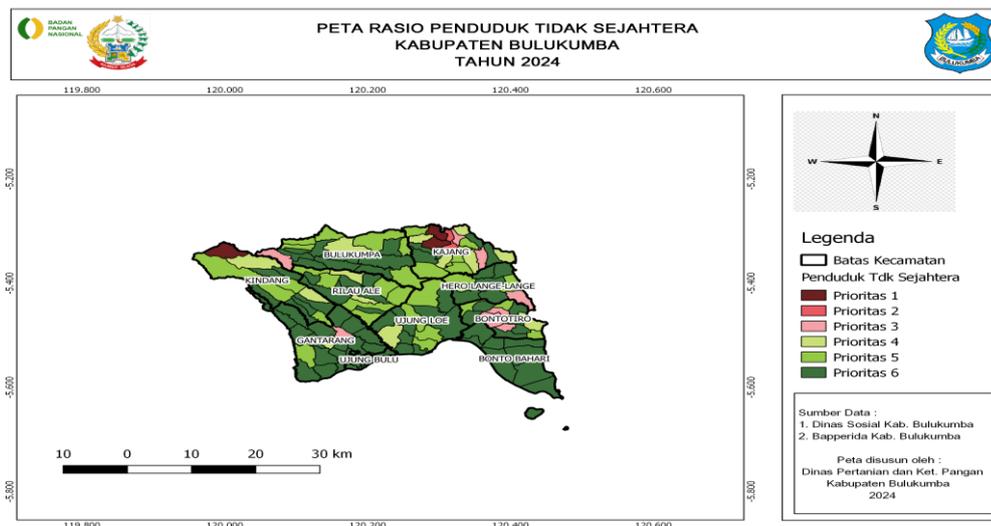
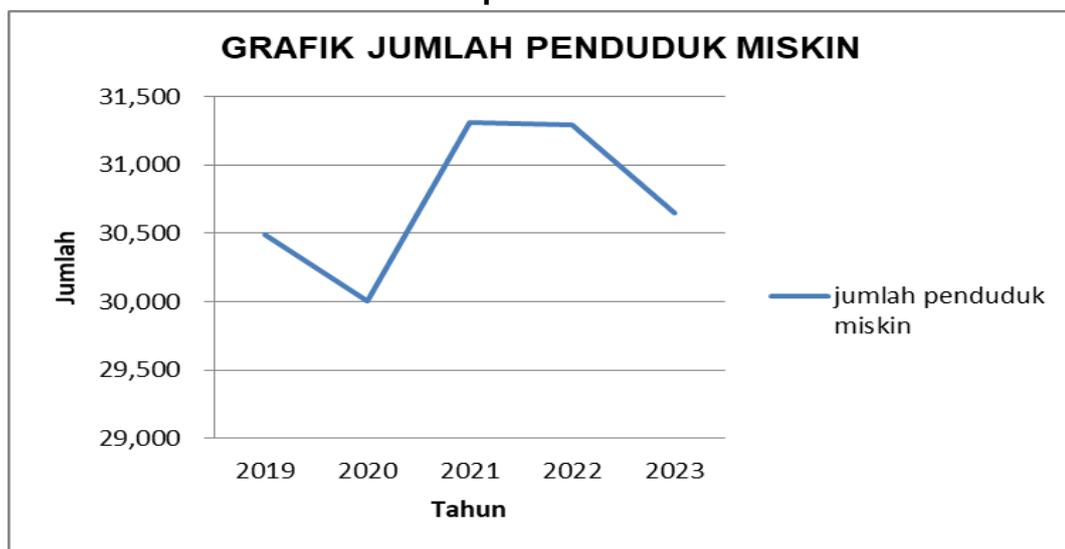
Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Bulukumba. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba terus mengalami penurunan dari 7,09% (31,31ribu jiwa) tahun 2021 menjadi 6,81% (30,65 ribu jiwa) tahun 2023.

Tabel 3.1 Persentase Populasi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	7,10	6,85	7,09	7,02	6,81

Sumber: Kabupaten Dalam Angka, BPS, 2024

Gambar 3.1 Grafik Persentase Populasi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Bulukumba



Peta 3.1. Peta Rasio Penduduk Tidak Sejahtera

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2023, terdapat 3 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah masuk dalam Prioritas 1 (2,21%), Sebanyak 1 desa (0,74%) masuk prioritas 2, dan 8 desa (5,88%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 12 desa tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Desa Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	Jumlah Desa	Prosentase (%)
1	0.25860000	3	2.21
2	0.19140000	1	0.74
3	0.15540000	8	5.88
4	0.12080000	13	9.56
5	0.08790000	31	22.79
6	0.00000000	80	58.82

Gambar 3.2. Grafik Sebaran Jumlah Desa dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah



3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai.

Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS 2024, di Kabupaten Bulukumba, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menyediakan jalan untuk kegiatan transportasi sepanjang 1.334,84 km dengan 77,66% dari total panjang jalan telah dilapisi aspal.

Menurut kondisi Jalan di Kabupaten Bulukumba, terdapat jalan sepanjang 514,64 km dalam kondisi baik, 183,46 km dalam kondisi sedang, 163,01 km dalam keadaan rusak dan 302,97 km dalam kondisi rusak berat. Kemudian Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Bulukumba diperoleh bahwa Jalan dengan permukaan aspal sepanjang 904,07 km, Jalan dengan permukaan kerikil sepanjang 235,36 km, Jalan dengan permukaan tanah sepanjang 24,63 km.

3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Keberhasilan pengembangan keterjangkauan/akses pangan di Kabupaten Bulukumba juga ditentukan oleh kebijakan dan strategi pengembangan keterjangkauan/akses pangan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kabupaten, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Renstra Dinas-dinas terkait.

Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan visi dan misi bupati terpilih Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026. Pencapaian visi dan misi diukur oleh akumulasi pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditentukan target dan dievaluasi pencapaian setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja (LKJ). Nilai akumulasi pada akhir tahun masa jabatan bupati menjadi indikator keberhasilan masa kepemimpinan bupati terpilih. Penetapan indikator kinerja daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dititikberatkan pada ukuran-ukuran kuantitatif dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.
- b. Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
- d. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- e. Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- f. Hasil analisis dan proyeksi lima tahun ke depan.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berkaitan kebijakan instansi terkait keterjangkauan pangan adalah dimana salah satu visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan periode 2021 – 2026 menyebutkan bahwa Optimalisasi potensi daerah diarahkan pada terkelolanya potensi sumber daya alam yang didalamnya terdapat berbagai macam pangan lokal yang bisa dikembangkan sebagai pangan yang mensubstitusi pangan beras. Hal ini dapat terwujud bila mana akses keterjangkau pangan dapat tersedia dengan baik. Baik dari segi akses pemanfaatan listrik, akses penghubung dan jalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk mencapai salah satu visi tersebut diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba mengembangkannya dalam misi tahun 2021 – 2026 yaitu :

Meningkatkan penguatan distribusi dan penyediaan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan. Misi tersebut mempunyai tujuan Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok dan cadangan pangan. Dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan kelembagaan distribusi pangan cadangan pangan dan stabilitas harga pangan.

Berdasarkan atas visi dan misi tersebut diatas, perlu diwujudkan melalui pelaksanaan strategi ketahanan pangan yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar ;

3. Mendorong peran swasta, masyarakat sipil dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan Dana Masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan

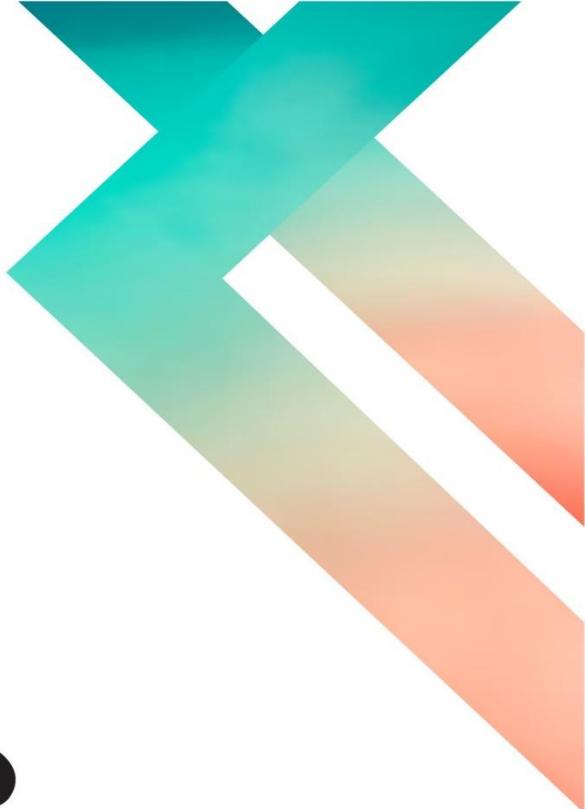
Pelaksanaan strategi diatas perlu diwujudkan dalam arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumberdaya lokal ;
2. Memantapkan penanganan kerawanan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan;
3. Stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
5. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
6. Pengawasan mutu dan keamanan pangan
7. Peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumberdaya lokal ;
8. Memantapkan penanganan kerawanan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan;
9. Stabilisasi pasokan dan harga pangan;

10. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
11. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
12. Pengawasan mutu dan keamanan pangan ;
13. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin;
14. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan ;
15. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri;
16. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh ;

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.



BAB IV

Pemanfaatan Pangan



BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi:

- (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan
- (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh.

Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu.

Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut:

- (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan
- (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat

diminum apabila telah dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Tahun 2023, tercatat 0 desa yang masuk dalam prioritas rawan pangan (prioritas 1-3) dan sebanyak 136 desa masuk dalam prioritas 6. Hal ini berarti, seluruh rumah tangga di Kabupaten Bulukumba telah mempunyai akses air bersih.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

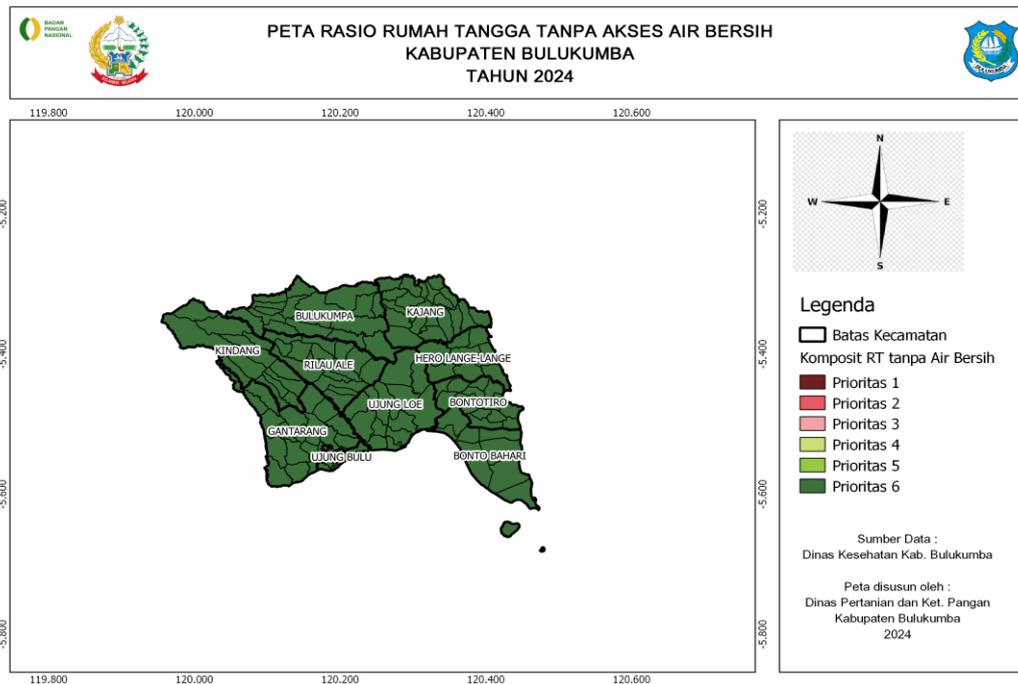
Prioritas	Rasio Rumah Tangga Tanpa Air Bersih	Jumlah Desa	Prosentase (%)
1	0.21630000	0	0.00
2	0.15640000	0	0.00
3	0.08610000	0	0.00
4	0.02540000	0	0.00
5	0.00530000	0	0.00
6	0.00000000	136	100.00
Jumlah		136	100.00

Gambar 4.1 Grafik Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas



¹ Permenkes 416 Tahun 1990

Peta 4.1. Peta Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih



4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Sebaran rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Bulukumba, diperoleh bahwa dari 136 desa terdapat **45 desa (33,09%) prioritas 1** yaitu Kel. Mariorenu, Desa Bialo, Desa Bontonyeleng, Desa Benteng Mallewang yang terletak di Kecamatan Gantarang, Desa Manyampa, Desa Balleanging, Desa Paccarammengang yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Desa Darubiah, Kel. Tanah Lemo, Desa Ara, Desa Lembanna, Kel. Benjala yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Desa Tritiro dan Desa Tamalanrea yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Kel. Bontokamase yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Lembang, Kel. Tanah Jaya, Kel. Laikang, Desa Pantama, Desa Tambangan, Desa Pattiroang, Desa Sapanang, Desa Maleleng yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Sapobonto, Desa Bontobulaeng, Desa Bulu – Bulu, Desa Bontomangiring, Desa Jojjolo, Kel. Ballasaraja, Desa Balangtarang, Desa Kambuno, Desa Barugae, Kel. Jawi – Jawi, Desa Tibona, Desa Bontominasa yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, Desa Batulohe, Desa Swatani, Desa Karama, Kel. Palampang, Desa Bajiminasa yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa Ganruntungan, Desa Anrihua, Desa Kindang, Desa Sopa, dan Desa Kahayya.

Terdapat **58 desa (42,65%) masuk dalam prioritas 2** yaitu Desa Bontomacinna, Desa Bontomasila, Desa Padang, Desa Bontosunggu, Desa Polewali, Desa Palambarae, Desa Bukit Harapan, Desa Dampang, Desa Bontoraja, Desa Benteng Gattareng yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kel. Kalumeme yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu,

Desa Salemba, Desa Manjalling, Desa Padangloang, Desa Seppang, Desa Bijawang, Desa Lonrong, Desa Balong, dan Desa Garanta yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Desa Bira dan Kel. Sapolohe yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Desa Caramming, Desa Pakubalaho, Desa Bontotangnga, Desa Bontomarannu, Desa Bontobarua, Desa Lamanda yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Borong, Desa Singa, Desa Tugondeng, Desa Pataro, Desa Gunturu yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Bontobiraeng, Desa Bontorannu, Desa Lembang Lohe, Desa Possi Tanah, Desa Sangkala, Desa Bontobaji, Desa Batunilamung, Desa Tanah Towa, Desa Mattoanging, Desa Lolisang yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Balangpesoang dan Desa Baruga Riattang yang terletak di Kecamatan Bulukumpa, Desa Tanah Harapan, Desa Bontomanai, Desa Batukaropa, Desa Bulolohe, Desa Bontoharu, Desa Bonto Mate'ne, Desa Bontolohe, Desa Topanda, Desa Pangalloang yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, Desa Mattirowalie, Desa Benteng Palioi, Desa Tamaona, Desa Orogading dan Desa Somba Palioi yang terletak di Kecamatan Kindang.

5 desa (3,68%) kategori prioritas 3 yaitu Kel. Matekko, Desa Paenrelompoe, Desa Barombong, Desa Bukit Tinggi, dan Desa Taccorong yang terletak di Kecamatan Gantarang, **2 desa (1,47%) prioritas 4** yaitu Kel. Bintarore Kecamatan Gantarang, dan Desa Sipaenre yang terletak di Kecamatan Kindang, **4 desa (2,94%) prioritas 5** yaitu Kelurahan Kasimpureng dan Kelurahan Tanah Kongkong yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa, dan Desa Anrang yang terletak di Kecamatan Rilau Ale, dan **22 desa (16,18%) prioritas 6** yaitu Kel. Jalanjang, Desa Gattareng yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kel. Loka, Kel. Bentengnge, Kel. Terang – Terang,

Kel. Caile, Kel. Ela-Ela yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Kel. Danjuang, dan Desa Tamatto yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Kel. Tanah Beru Kecamatan Bontobahari, Kel. Ekatiro, Desa Buhung Bundang, Desa Dwitiro, dan Desa Batang yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Karassing dan Desa Tanuntung yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari, Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa, Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Desa Balibo dan Kel. Borong Rappoa yang terletak di Kecamatan Kindang. Hal ini menunjukkan kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang melayani di setiap desa.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Tenaga Kesehatan	Jumlah Desa	Prosentase (%)
1	3.14820000	45	33.09
2	1.38300000	58	42.65
3	0.78980000	5	3.68
4	0.43010000	2	1.47
5	0.30210000	4	2.94
6	0.00000000	22	16.18
Jumlah		136	100.00

Gambar 4.2. Grafik sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas



- Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

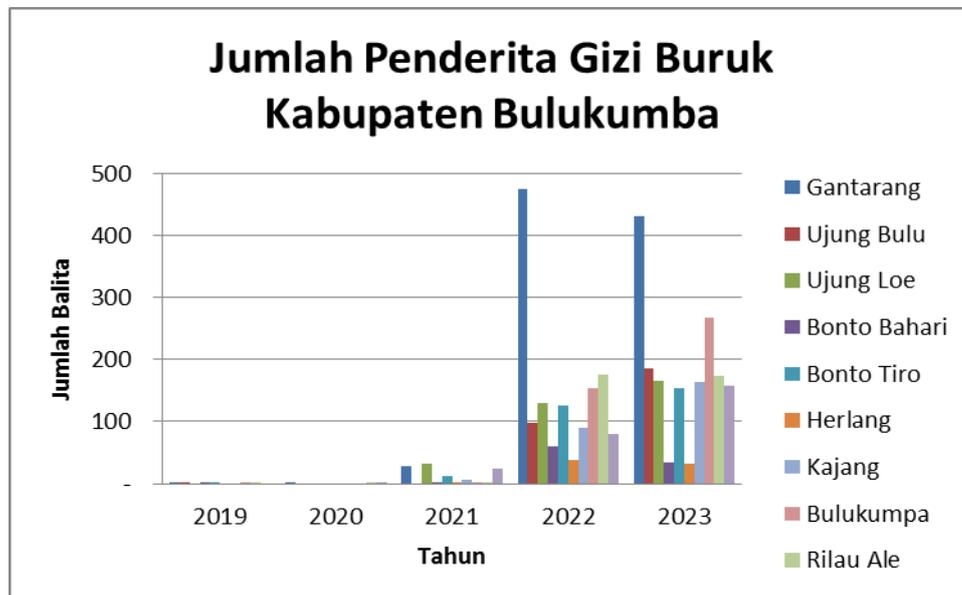
Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Bulukumba meningkat pada tahun 2023 sebanyak 1.768 balita, dimana pada tahun 2022 sebanyak 1.423 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Gantarang (432 balita), Bulukumpa (268 balita), Ujung Bulu (186 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Bontobahari (35 balita) dan Herlang (33 balita).

Tabel 4.3 Jumlah Penderita Gizi Buruk 2019-2023

Kecamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gantarang	1	1	28	474	432
Ujung Bulu	2	-	-	98	186
Ujung Loe	-	-	32	130	165
Bonto Bahari	1	-	1	59	35
Bonto Tiro	1	-	13	126	154
Herlang	-	-	1	38	33
Kajang	-	-	7	90	164
Bulukumpa	2	-	2	153	268
Rilau Ale	2	2	1	176	174
Kindang	-	1	24	79	157
Jumlah	9	4	109	1,423	1,768

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Gambar 4.3 Grafik Penderita Gizi Buruk Tahun 2019-2023



Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Bulukumba adalah 77 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Gantarang (19 jiwa), Kecamatan Ujung Bulu (12 jiwa), Kecamatan Rilau Ale (10 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Herlang (3 jiwa), dan Kecamatan Ujung Loe (2 jiwa). Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Bulukumba adalah 9 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kindang (masing – masing 2 jiwa) sedangkan di Kecamatan Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Rilau Ale (masing – masing 1 jiwa), sedangkan Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kajang, dan kecamatan Bulukumpa tidak terdapat kematian balita (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Kematian		
	Balita	Ibu Saat Melahirkan	Total
Gantarang	19	0	19
Ujung Bulu	12	1	13
Ujung Loe	5	1	6
Bonto Bahari	2	1	3
Bonto Tiro	7	1	8
Herlang	3	2	5
Kajang	10	0	10
Bulukumpa	4	0	4
Rilau Ale	10	1	11
Kindang	5	2	7
Jumlah	77	9	86

Gambar 4.4 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan



4.4 STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Bulukumba masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

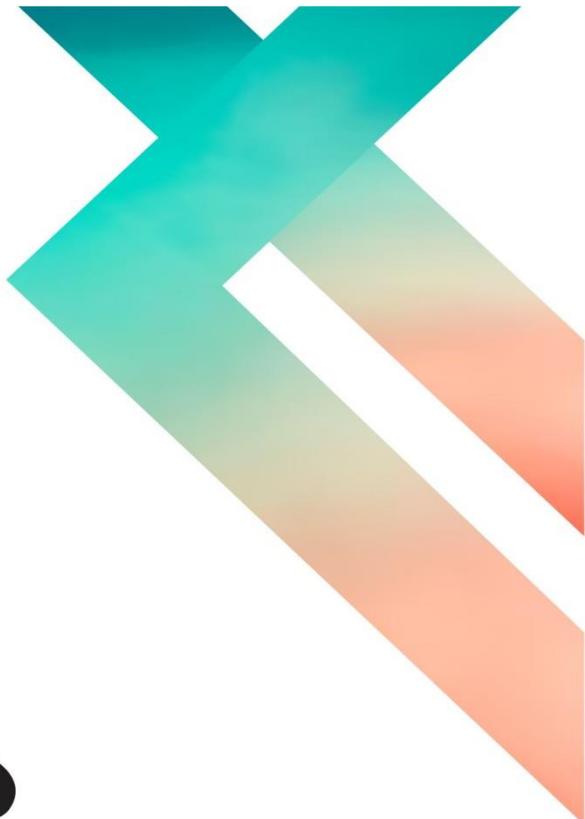
- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.

- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi tiga penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan) :
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.

- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.



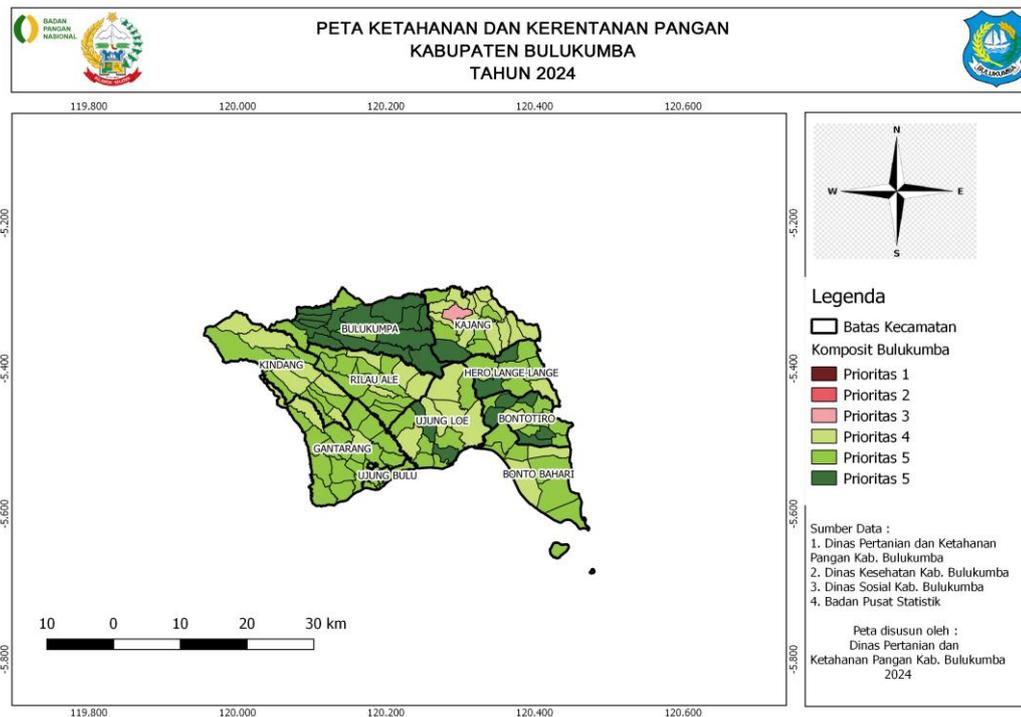
BAB V

Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Komposit



BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.



Peta 6.1. Peta Komposit Kabupaten Bulukumba

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 136 desa yang ada di Kabupaten Bulukumba maka didapatkan 0 desa (Prioritas 1, dan Prioritas 2), **1 desa prioritas 3 (0,74%)** yaitu Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, **34 desa prioritas 4 (25%)** yaitu Desa Bukit Tinggi, Desa Benteng Gattareg, dan Desa Bonto Mallewang Kecamatan Gantarang, Desa Seppang, Desa Balong, Desa Manyampa, Desa Balleanging dan Desa Tamatto yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Kelurahan Tanah Lemo, dan Desa Lembanna yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Desa Tamalanrea yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Kelurahan Bonto Kamase di Kecamatan Herlang, Desa Lembang, Desa Lembang Lohe, Kel. Tanah Jaya, Kelurahan Laikang, Desa Pantama, Desa Tambangan,

Desa Bontobaji, Desa Pattiroang, Desa Batunilamung, Desa Malleleng, Desa Mattoanging, dan Desa Lolisang yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Swatani, Desa Karama, Desa Bulolohe, dan Kel. Palampang yang terletak Rilau Ale, Desa Garuntungan, Desa Anrihua, Desa Kindang, Desa Sopa, Desa Somba Palioi, dan Desa Kahayya yang terletak Kecamatan Kindang.

76 desa prioritas 5 (55,88%) yaitu Kelurahan Mariorennu, Kelurahan Jalanjang, Kelurahan Matekko, Desa Paenre Lompoe, Desa Bialo, Desa Bontomacinna, Desa Bontomasila, Desa Padang, Desa Barombong, Desa Bontosunggu, Desa Polewali, Desa Palambarae, Desa Bontonyeleng, Desa Bukit Harapan, Desa Dampang, Desa Bontoraja, Desa Gattareng, Desa Taccorong yang terletak di Kecamatan Gantarang, Kelurahan Bintarore, Kelurahan Kasimpureng, Kelurahan Tanah Kongkong, Kelurahan Loka, Kelurahan Bentengge Kelurahan Caile, Kelurahan Kalumeme, Kelurahan Ela – Ela yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu, Desa Salemba, Kelurahan Dannuang, Desa Padangloang, Desa Bijawang, Desa Garanta, dan Desa Paccarammengang yang terletak di Kecamatan Ujung Loe, Desa Bira, Desa Darubiah, Desa Ara, Kelurahan Tanah Beru, Kelurahan Sapolohe, dan Kelurahan Benjala yang terletak di Kecamatan Bontobahari, Desa Tritiro, Kelurahan Ekatiro, Desa Buhung Bundang, Desa Dwitiro, Desa Batang, Desa Bonto Barua dan Desa Borong yang terletak di Kecamatan Bontotiro, Desa Borong, Desa Tanuntung, Desa Singa, Desa Tugondeng, dan Desa Gunturu yang terletak di Kecamatan Herlang, Desa Bontorannu, Desa Possi Tanah, Desa Lembanna, Desa Sangkala, Desa Sapanang yang terletak di Kecamatan Kajang, Desa Sapobonto, Kelurahan Ballasaraja, dan

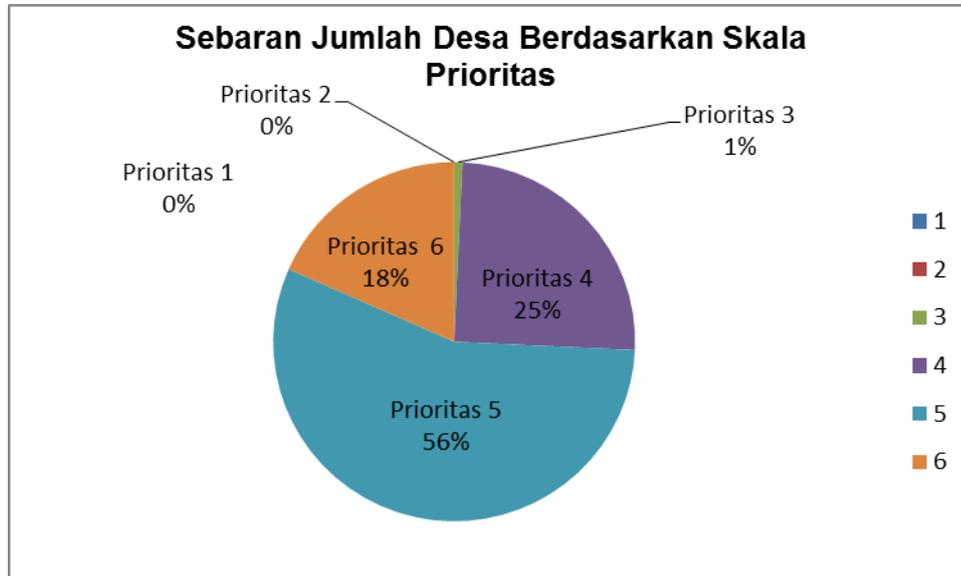
Desa Balang Pesoang yang terletak di kecamatan Bulukumpa, Desa Tanah Harapan, Desa Bontomanai, Desa Batukaropa, Desa Bontobangun, Desa Bontoharu, Desa Bajiminasa, Desa Anrang, Desa Bontomate'ne, Desa Bontolohe, Desa Topanda, dan Desa Pangalloang yang terletak di Kecamatan Rilau Ale. Desa Balibo, Desa Mattirowalie, Desa Benteng Palioi, Kelurahan Borong Rappoa, Desa Tamaona, Desa Orogading, dan Desa Sipaenre yang terletak di Kecamatan Kindang.

25 desa prioritas 6 (18,38%) yaitu Kelurahan Terang – Terang yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Desa Manjalling dan Desa Lonrong yang terletak di Kecamatan Ujung Loe. Desa Caramming, Desa Pakubalaho, Desa Bonto Bulaeng, Desa Bontotangnga dan Desa Bontomarannu yang terletak di Kecamatan Bontotiro. Desa Karassing dan Desa Pataro di Kecamatan Herlang. Desa Bontobiraeng, Desa Bonto Bulaeng, Desa Bulo –Bulo, Desa Salassae, Desa Bontomangiring, Desa Jojjolo, Kelurahan Tanete, Desa Balangtaroang, Desa Kambuno, Desa Barugae, Kelurahan Jawi – Jawi, Desa Tibona, Desa Bontominasa, Desa Batulohe, dan Desa Baruga Riattang yang terletak di Kecamatan Bulukumpa.

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Prosentase (%)
1	0	0.00
2	0	0.00
3	1	0.74
4	34	25.00
5	76	55.88
6	25	18.38
Jumlah	136	100.00

Gambar 5.1 Grafik Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas



Tabel 5.2. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas per kecamatan

Kecamatan	Prioritas						Jumlah Desa
	1	2	3	4	5	6	
Gantarang	-	-	-	3	18	-	21
Ujung Bulu	-	-	-	-	8	1	9
Ujung Loe	-	-	-	5	6	2	13
Bonto Bahari	-	-	-	2	6	-	8
Bonto Tiro	-	-	-	1	7	5	13
Herlang	-	-	-	1	5	2	8
Kajang	-	-	1	12	5	-	18
Bulukumpa	-	-	-	-	3	15	18
Rilau Ale	-	-	-	4	11	-	15
Kindang	-	-	-	6	7	-	13
Jumlah	-	-	1	34	76	25	136

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 dan Prioritas 2 tidak ada di Kabupaten Bulukumba.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan **prioritas 3** terdapat di wilayah Kecamatan Kajang (1 desa) yaitu Desa Tanah Towa. Desa ini adalah desa adat yang terbilang unik karena memiliki ciri khasnya tersendiri. Mulai dari segi budaya hingga pakaian yang digunakannya. Saat ini, desa adat tersebut telah memiliki wisata Budaya Kampung Adat Ammatoa Kajang. Kehidupan masyarakat Kajang Ammatoa sangat sederhana. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam.

Kehidupan Suku Kajang sangat lekat dengan alam dan hukum adatnya yang sangat kental dan masih berlaku hingga sekarang. Mereka lebih bersifat tertutup dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi. Hal yang menarik dan unik dari Suku Kajang adalah hutan yang masih alami, sederhana, alam yang masih asri dan hutan masih terjaga, serta pakaian yang serba hitam dan tanpa menggunakan alas kaki.

Prioritas 4 terdapat di wilayah Kecamatan Gantarang (3 desa), Kecamatan Ujung Loe (5 desa), Kecamatan Bontobahari (2 desa), Kecamatan Bontotiro (1 desa), Kecamatan Herlang (1 desa), Kecamatan Kajang (12 desa), Kecamatan Rilau Ale (4 desa) dan Kecamatan Kindang (6 desa) (Gambar 5.2).



Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 4 Per Kecamatan

Desa Agak tahan terhadap kerawanan pangan **prioritas 5** terdapat di 76 desa/kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Gantarang (18 desa/kel), Kecamatan Ujung Bulu (8 kelurahan), Kecamatan Ujung Loe (6 desa/kel), Kecamatan Bonto Bahari (6 desa/kel), Kecamatan Bonto Tiro (7 desa/kel), Kecamatan Herlang (5 desa/Kel), Kecamatan Kajang (5 desa/kel); Kecamatan Bulukumpa (3 desa/kel), Kecamatan Rilau Ale (11 desa/kel); dan Kecamatan Kindang (7 desa/kel).(Gambar 5.3).



Gambar 5.3 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 5 Per Kecamatan

Desa kategori tahan terhadap kerawanan pangan **prioritas 6** terdapat di 25 desa/kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Ujung Bulu (1 kelurahan), Kecamatan Ujung Loe (2 desa/kel), Kecamatan Bontotiro (5 desa), Kecamatan Herlang (2 desa), dan Kecamatan Bulukumpa (15 desa). (Gambar 5.4).



Gambar 5.4 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 6 Per Kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3, Prioritas 4, dan Prioritas 5 secara umum disebabkan oleh:

- (1) Rasio lahan,
- (2) Rasio Sarana dan prasarana
- (3) Rasio penduduk per tenaga Kesehatan per density.
- (4) Rasio Jumlah Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk.

Strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan, antara lain:

➤ ***Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Luas Wilayah Desa***

1. Program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
 - a. Peningkatan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai (cetak sawah, Upsus Pajale)
 - b. Pengembangan produksi pangan pada daerah lahan kering (penanaman jagung di lahan khusus)
 - c. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian seperti saluran irigasi, drainase, waduk, jalan usaha tani (pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan, rehabilitasi irigasi rawa, rehabilitasi jaringan irigasi, penyaluran bantuan alsintan)
 - d. Pemberian subsidi untuk benih dan bibit pangan lokal serta pupuk
 - e. Peningkatan kapasitas petani (SLPHT, SLPTT)
 - f. Pembinaan terhadap masyarakat/kelompok pengelola air irigasi
 - g. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan (Poktan, Gapoktan, KTNA, HKTI)

- h. Penetapan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka swasembada beras
2. Program Optimalisasi Lahan Sawah
 - a. Peningkatan Produksi Sawah dengan Alih Teknologi Tepat Guna;
 - b. Pemanfaatan Pupuk Jerami sebagai Pupuk Organik Alternatif ;
 - c. Pembukaan Lahan Sawah Baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal desa
 3. Program Diversifikasi Pangan
 - a. Penguatan Kelompok Wanita Tani dalam memanfaatkan hasil pekarangan ;
 - b. Pengembangan pangan lokal daerah sebagai pangan alternatif daerah melalui pengolahan pangan lokal ;
 - c. Lomba Cipta Menu Kelompok Wanita Tani dengan bahan Non Beras Non Terigu sesuai produksi daerah setempat ;
- ***Rasio Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyedia pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga***
1. Program peningkatan dan pengembangan potensi desa:
 - a. Peningkatan fasilitas perdagangan dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan
 - b. Fasilitasi dan sosialisasi penguatan modal usaha bagi petani dan ekonomi perdesaan (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan/LUEP, Kredit Usaha Tani/KUT, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E)
 - c. Pengembangan program penyediaan pangan murah (Toko Tani Indonesia/TTI, Rumah Pangan Kita/RPK, E-warung)

- d. Penguatan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD, Pembangunan lumbung dengan dana DAK)
 - e. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di perdesaan (One Village One Day/OVOP, BUM Desa)
2. Program peningkatan dan pengembangan potensi sumberdaya pangan lokal, serta keragaman konsumsi pangan masyarakat:
 - a. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal
 - b. Pengadaan dan peningkatan produksi bibit dan benih lokal
 - c. Sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dengan menggunakan pangan lokal
 - d. Sosialisasi dan pembinaan petani dalam pembudidayaan bibit dan benih lokal
 - e. Fasilitasi dan pendampingan UMKM untuk mengembangkan bisnis dan industri berbasis pangan lokal dalam penyediaan bahan pangan pokok lokal non beras (antara lain bantuan alat pengolah tepung-tepungan, bantuan modal dan bantuan manajemen UMKM)
 3. Program peningkatan dan pengembangan ketersediaan pangan
 - a. Peningkatan stok pangan masyarakat dan stabilisasi harga melalui pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (Serapan Gabah/Sergap, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM)
 - b. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti impor

- c. Pengembangan ketersediaan pangan berbasis non beras (umbi-umbian)
- d. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL)

➤ **Rasio Penduduk dengan Status Kesejahteraan Terendah**

1. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - a. Fasilitasi dan sosialisasi perluasan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (PNPM Mandiri)
 - b. Fasilitasi dan sosialisasi pengembangan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun perdesaan (Kredit Usaha Rakyat/KUR)
 - c. Fasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif
 - d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (Raskin, Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) dengan menggunakan anggaran tambahan dari kabupaten untuk meningkatkan cakupan dari program nasional tersebut.
2. Program peningkatan akses pangan masyarakat
 - a. Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan
 - b. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen
 - c. Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah serta isolasi daerah
 - d. Meningkatkan sistem informasi pasar

- e. Pembuatan kebijakan untuk menghilangkan hambatan distribusi pangan karena pungutan resmi dan tidak resmi

➤ ***Desa yang Tidak memiliki Akses Penghubung Memadai***

1. Program perbaikan dan pengembangan jaringan jalan pedesaan
 - a. Peningkatan aksesibilitas terutama jalan penghubung antar desa dan akses jalan ke sentra-sentra produksi
 - b. Penambahan sarana transportasi produk pangan hingga ke wilayah pedesaan
 - c. Rehabilitasi jalan dan jembatan baik secara berkala maupun akibat bencana alam
 - d. Menambah jaringan jalan-jalan baru untuk mendukung distribusi pangan, antisipasi kejadian bencana alam dan akses ke pusat ekonomi atau kawasan pariwisata
 - e. Penyediaan sarana jalan alternatif sebagai penunjang akses jalan masyarakat ;

➤ ***Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih***

1. Program peningkatan pelayanan akses air bersih daerah bagi masyarakat miskin
 - a. Pengelolaan dan pengembangan sumber mata air, supaya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat secara merata.
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber mata air yang telah ada
 - c. Pengoptimalan sumber air bersih selain dari sumber mata air (jaringan PDAM)
 - d. Pendistribusian air secara merata pada seluruh wilayah perencanaan melalui sistem pipanisasi

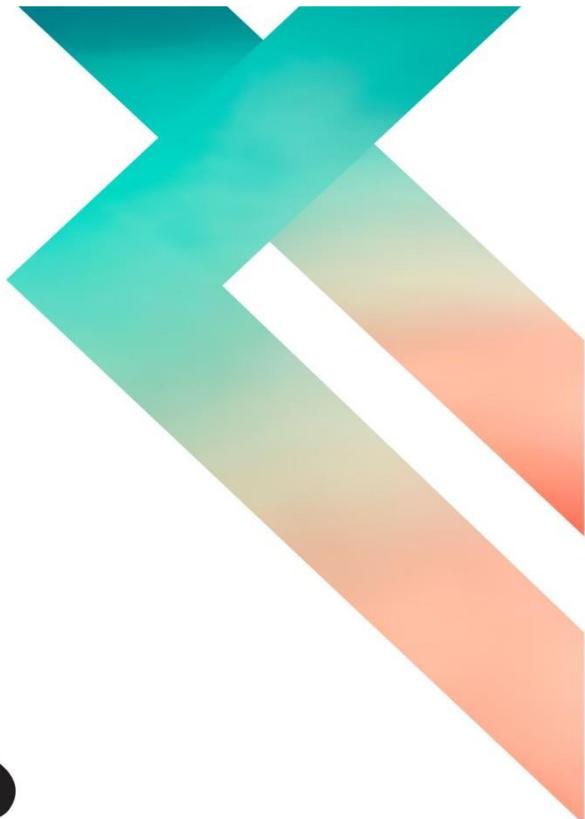
- e. Penyediaan kran umum atau sumur umum
- f. Pengembangan sistem pengelolaan air bersih secara sederhana yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui kegiatan HIPAM

➤ **Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk**

1. Program peningkatan pelayanan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan
 - a. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata termasuk bagi masyarakat pedesaan (Poskesdes, Polindes, Posyandu)
 - b. Sosialisasi peningkatan mutu kesehatan dasar
 - c. Sosialisasi peningkatan perbaikan gizi masyarakat
 - d. Perbaikan sistem jaminan kesehatan masyarakat
 - e. Fasilitasi peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan serta perbekalan obat-obatan
 - f. Sosialisasi peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita
 - g. Peningkatan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya
 - h. Sosialisasi peningkatan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif
 - i. Fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN, Kartu Indonesia Sehat/KIS)

2. Program peningkatan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
 - a. Penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis Tim (*Team Based*)
 - b. Peningkatan distribusi tenaga kesehatan yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik
 - c. Pengembangan insentif bagi tenaga kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan baik berwujud material maupun non material Peningkatan kuantitas sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu.





BAB VI

Rekomendasi Kebijakan



BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- b. Desa-desa di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- c. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan

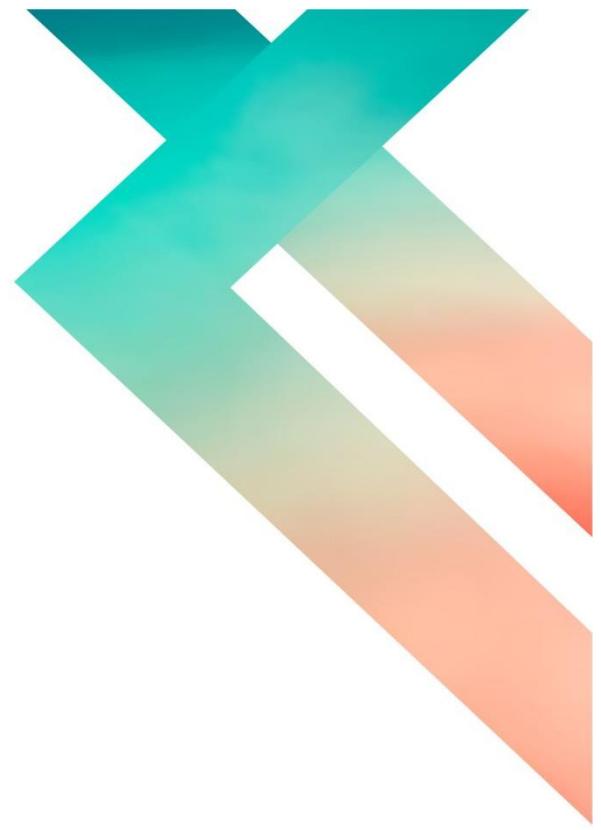


Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- Pembukaan lahan pertanian pertanian baru pada kawasan rawan pangan
- Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

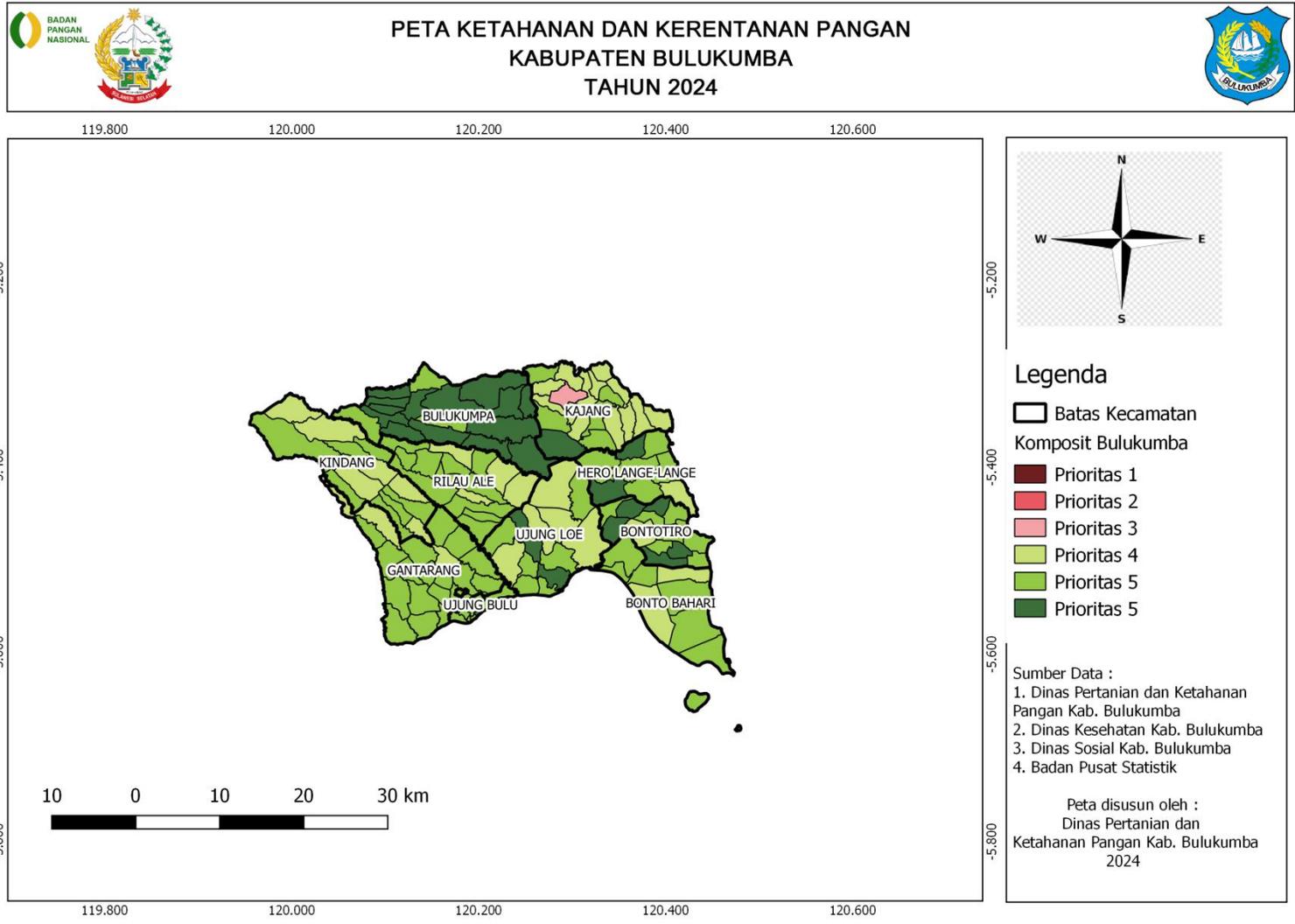
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah rawan pangan

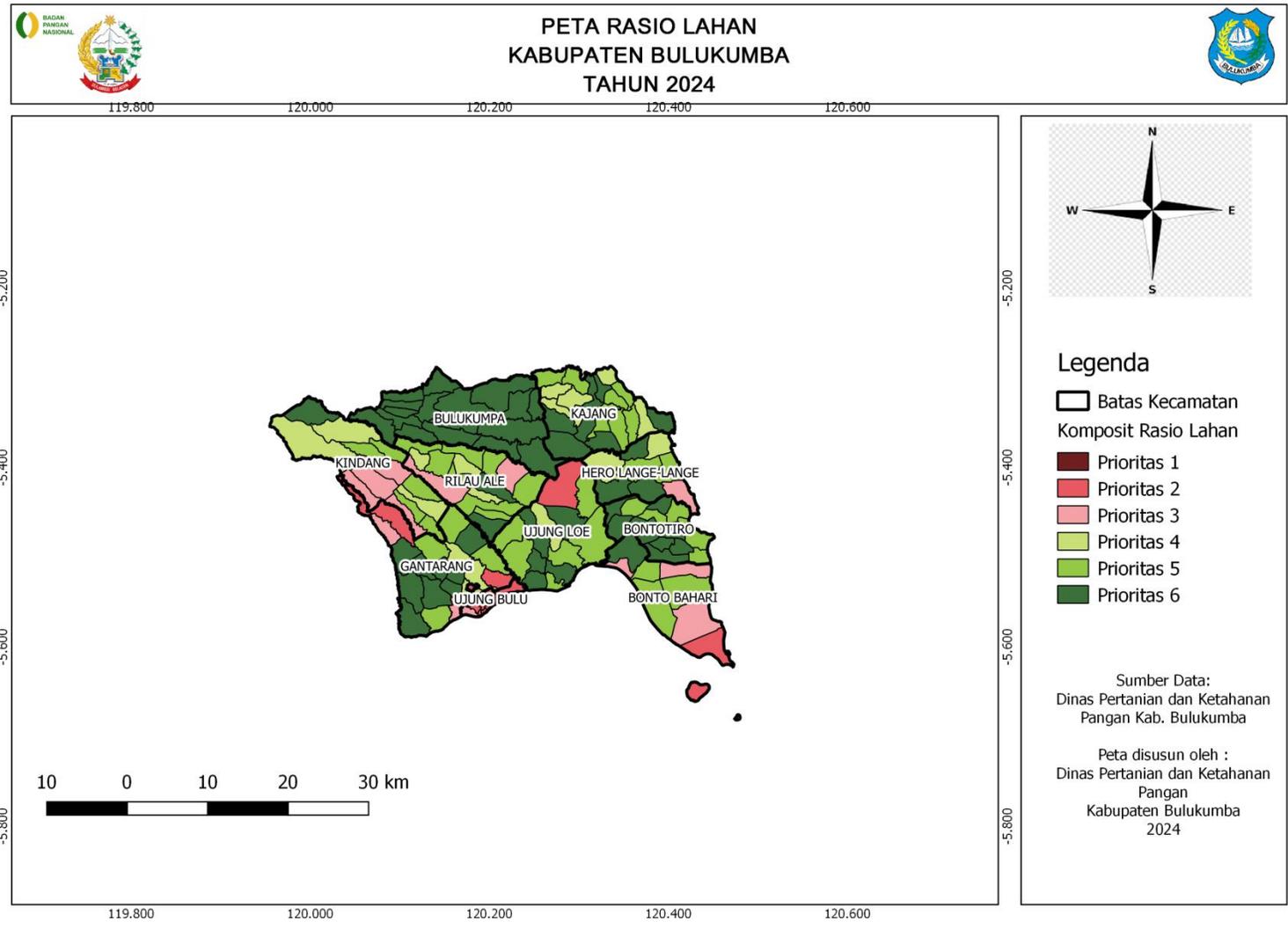


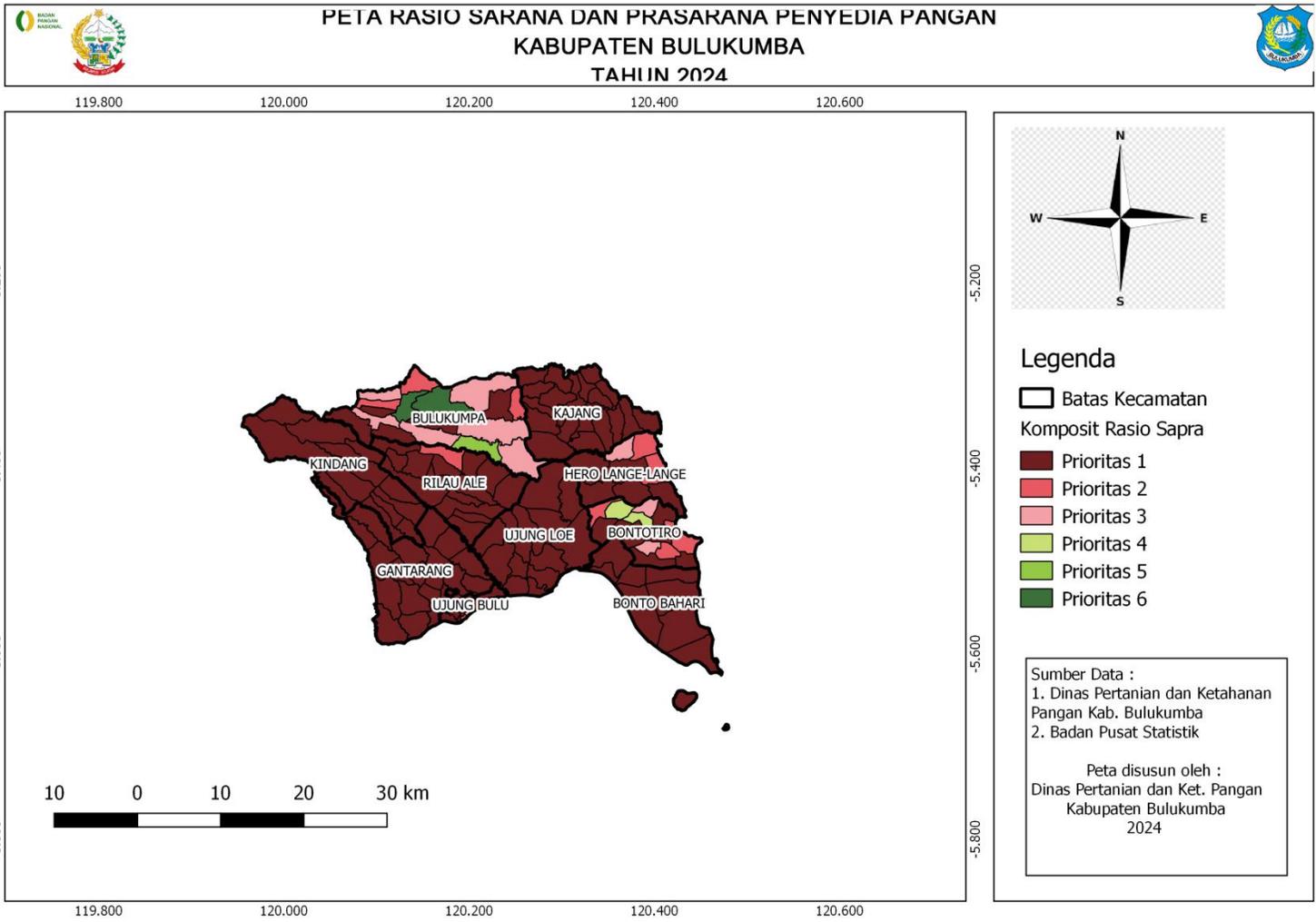


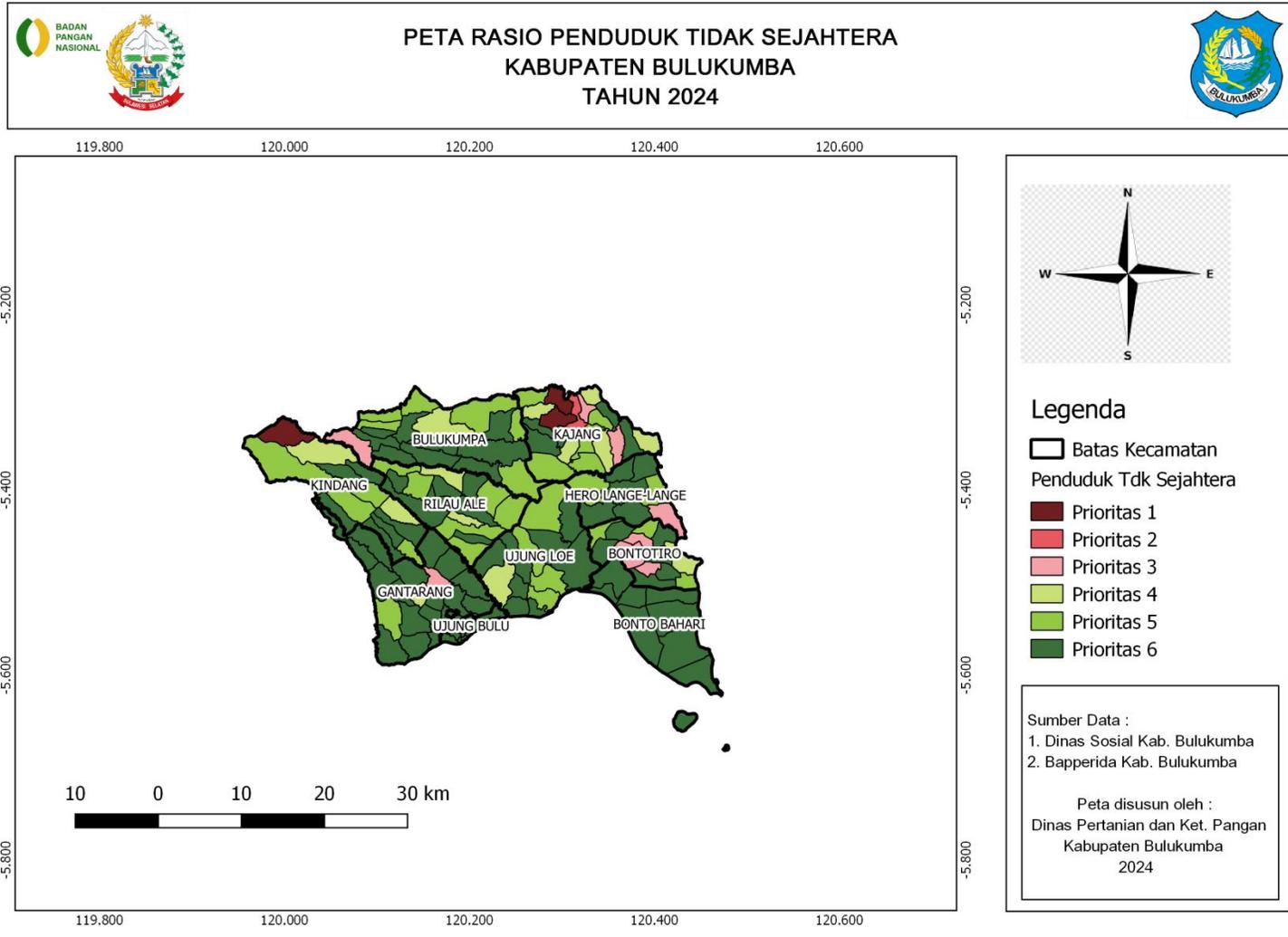
LAMPIRAN

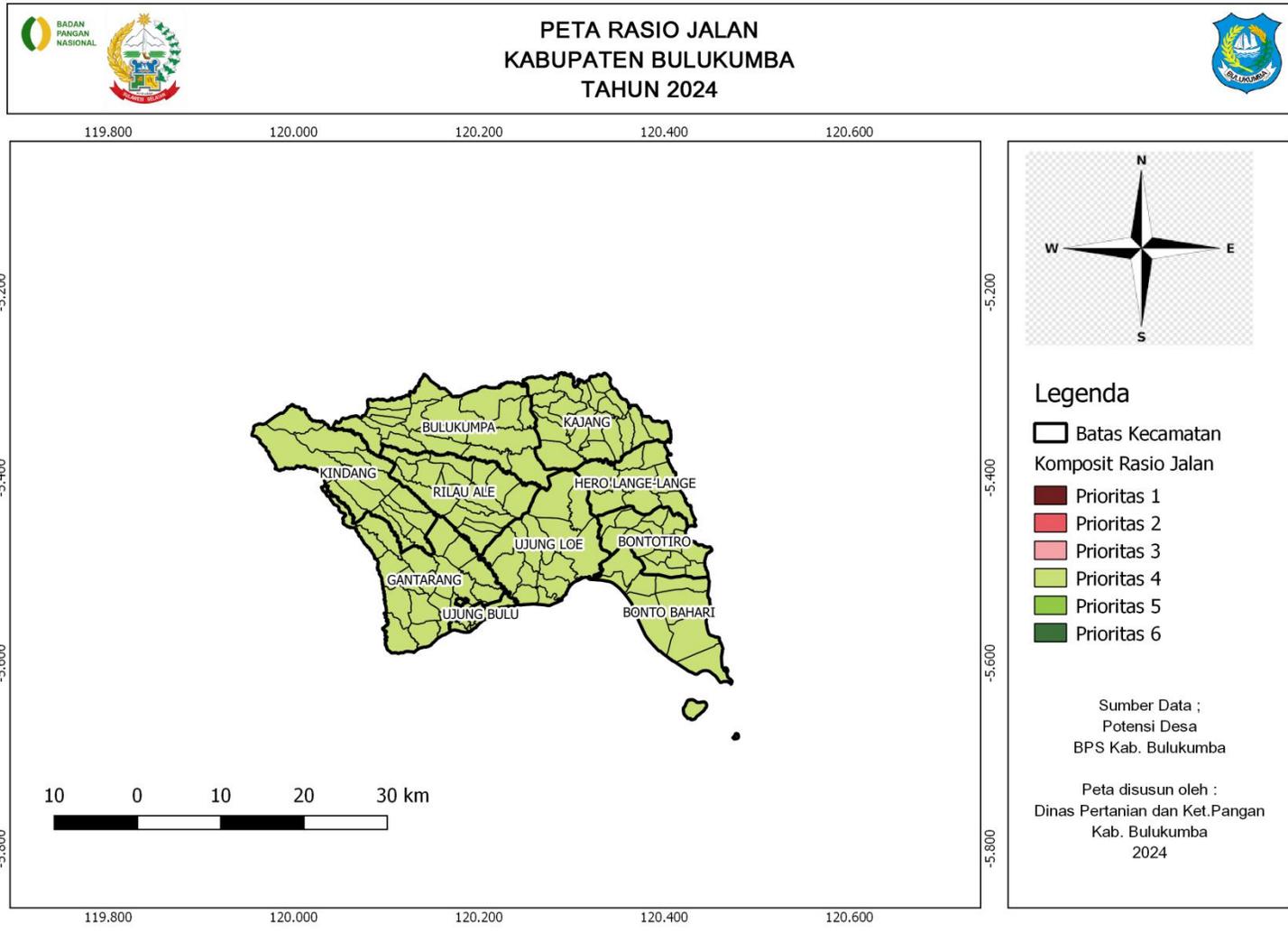


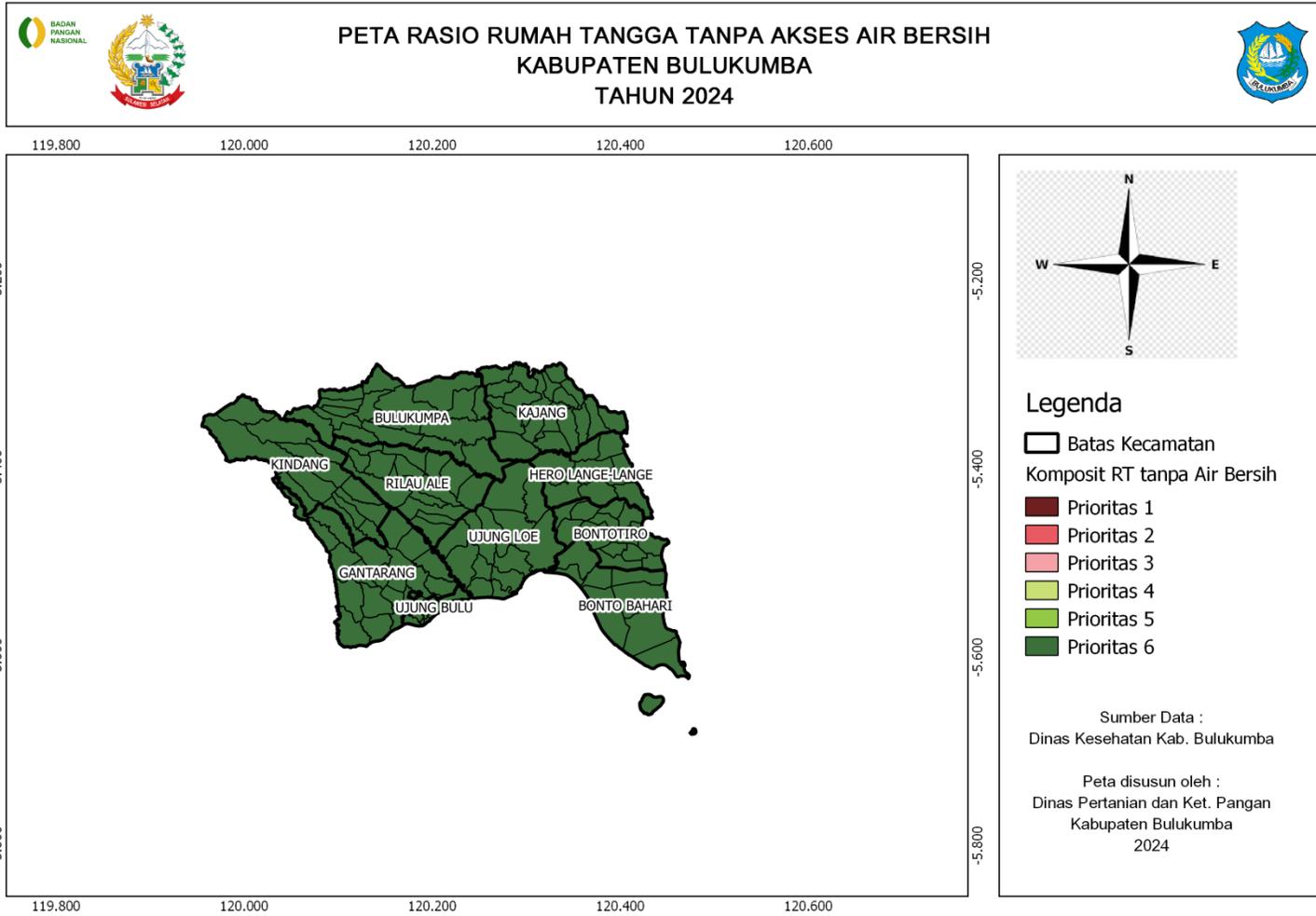


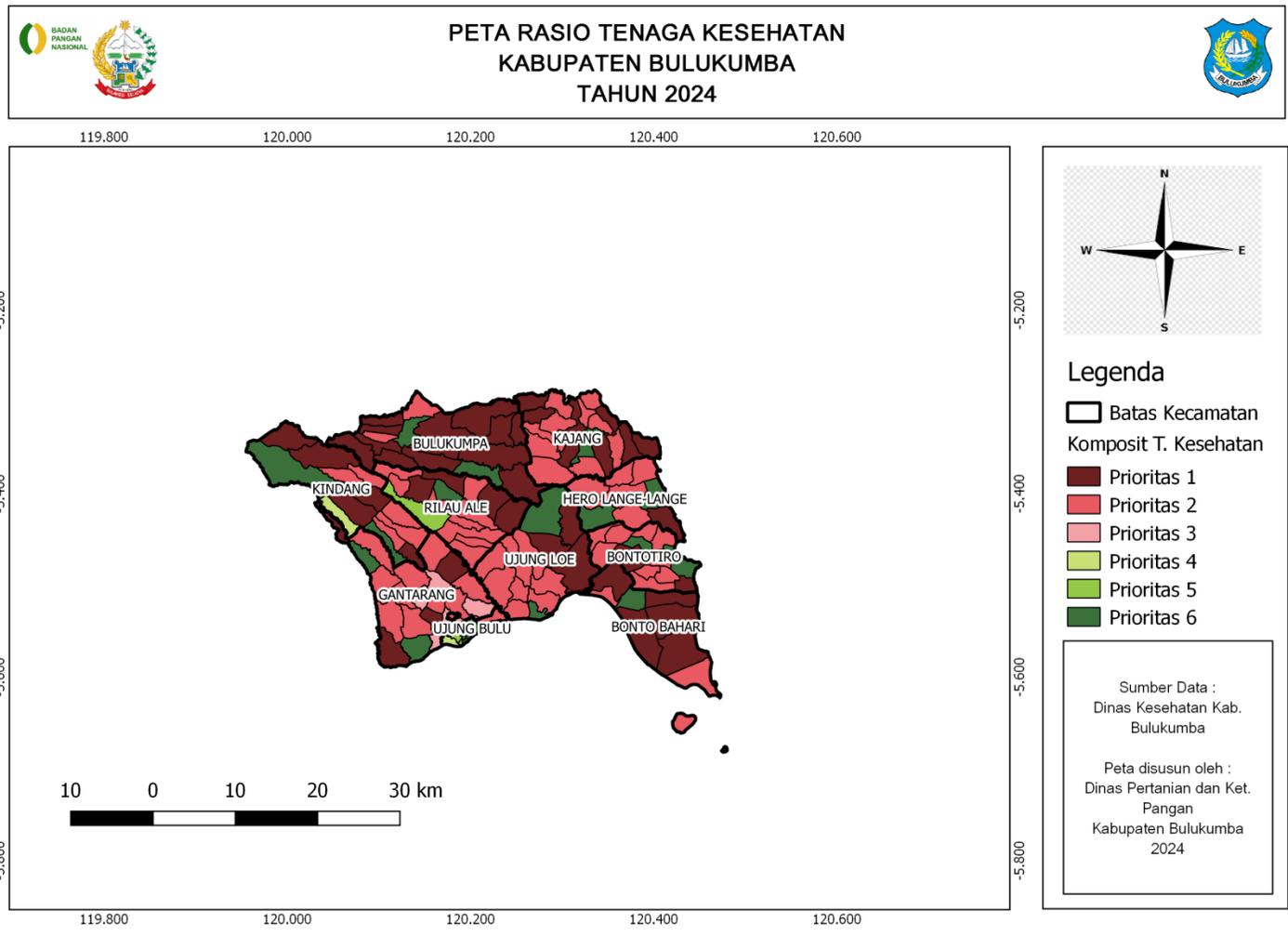












**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BULUKUMBA**

*Jln. Sultan Hasanuddin No. 44 Telp. (0413) 2510128
E-mail : dtphp.blk@gmail.com Website : www.distphbun.bulukumbakab.go.id*